

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGELOLAAN ALOKASI  
DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN  
DI DESA PANOMPIAN JAE KECAMATAN ANGKOLA  
TIMUR KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**RIZKI ANANDA SIAGIAN**

**NPM 1303100032**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN**

**2017**

## PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, Rizki Ananda Siagian, NPM 1303100032, menyatakan bahwa sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh Undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain adalah tindak kejahatan yang harus dihukum menurut Undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulis saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat atau karya ciplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan si suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai ujian skripsi saya ini dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Maret 2017

Yang menyatakan

Rizki Ananda Siagian

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam juga penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kabar kepada manusia bahwa pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan di dunia dan di akhirat.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan strata-1 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Administrasi Negara:Administrasi Pembangunan).

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak. Terutama kepada yang teristimewa Orang Tua, Ayahanda tersayang Abdollah Siagian dan Ibunda tercinta Rosmawarni Harahap sebagai orang tua yang sangat berjasa dalam segala hal dari saat penulis di dalam kandungan hingga saat ini dan saudaraku Lenny Mariana Siagian ,Ahmad fadli Siagian dan Tunggul Rambe yang selalu memberi semangat diasaat penulis menyelesaikan skripsi ini.

Oleh sebab itu, sudah selayaknya segala keindahan hati mengucapkan terimakasih yang tulus kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu, kepada yang terhormat:

1. Kepada Bapak Dr. Agussani., M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Kepada Bapak Drs. Tasrif Syam., M.Si selaku Dekan dan juga selaku dosen pembimbing satu Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Kepada Ibu Nalil Khairiah S.IP, M.Pd selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
4. Kepada Bapak Dr. Arifin Saleh., M.SP selaku pembimbing dua yang telah banyak memberikan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terima kasih atas materi kuliah yang telah diberikan selama ini.
6. Seluruh pegawai dan keluarga besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selama ini telah memberikan dukungan dan semangat demi terselesaikannya skripsi ini.
7. Kepada Bapak Samsul Marif Hasibuan selaku Kepala Desa di Desa Panompuan Jae beserta seluruh staf Pemerintahan Desa.
8. Kepada sahabatku bou Nofrini Siregar, Eda Kandung Masrohana Harahap, Eda Tiriku Nasroaini Harahap, Nursaima Harahap dan Sorli Anridawani Siregar. Terima kasih atas waktu dan kenangan yang tak akan hapus oleh waktu.
9. Kepada teman-teman ku tersayang, Desi Masari Harahap, Hapni Khairani Harahap, Cardi Rizky Situmeang. Terima Kasih untuk semua bantuannya teman.
10. Kepada teman-teman seperjuangan mulai dari awal kuliah sampai akhir Afifah Matondang, Jusma Lubis, Vani aprillia, Tri Rizki Rahmayani, Irma Ynita, Diny Aryani, Winda Sartika, Ummi Kalsum, Nurmalia, Ririn sehat selalu teman dan semoga kita bisa menjadi orang yang berguna dimasa depan.
11. Kepada Adek Kos Ku Sasniar, Risma, Silvi Hasibuan, Ika , Suci Kuncen, Arni Liliq, Haryati , Tania dealoya, Sinar Mentari. Terima kasih atas kasih sayang dan suara-suara sumbang nya.
12. Kepada Abdul Rahim Nasution S.P terima kasih atas ilmu dan waktu nya, sehat selalu ya.

13. Kepada Alumni Sekolah MIN Panompuan Tonga, Ponpes Nurul Falah Tamosu dan SMA N 6 Padang Sidempuan.

14. Kepada seluruh angkatan 2013 Mahasiswa IAN FISIP UMSU, semoga kita bisa menjadi agent of change untuk Indonesia.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya.

Medan, Maret 2017

Penulis

Rizki Ananda Siagian

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA  
DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DESA  
PANOMPIAN JAE KECAMATAN ANGKOLA TIMUR KABUPATEN  
TAPANULI SELATAN**

**RIZKI ANANDA SIAGIAN**

**NPM 1303100032**

**ABSTRAK**

Desa Panompuan Jae adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. Desa Panompuan Jae merupakan salah satu desa yang menerima bantuan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan. Sehingga dengan adanya Alokasi Dana Desa ini dapat mempercepat pembangunan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melihat kondisi pembangunan yang kurang efektif seperti pembangunan yang sebagian besar dilakukan pada pembangunan fisik, sedangkan dalam pemberdayaan masyarakat masih sangat kurang efektif. Hal ini dapat memperlambat proses pembangunannya dan tujuan utama dari Alokasi Dana Desa tidak akan tercapai jika Sumber Daya Manusianya masih lemah. Dengan melihat masalah yang timbul pada pembangunan di Desa Panompuan Jae maka tujuan dari Alokasi Dana Desa ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Panompuan Jae Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menyajikan data yang telah didapat dari hasil penelitian dilapangan melalui wawancara secara langsung serta data-data berupa dokumen, arsip dan referensi lainnya yang diperoleh di Desa Panompuan Jae. Yang menjadi narasumber dalam penelitian ini berjumlah 5 orang, dimana terdiri dari 4 pegawai pemerintahan Desa Panompuan Jae dan 1 masyarakat Desa Panompuan Jae. Hasil penelitian tentang efektivitas pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Panompuan Jae Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan sudah dilaksanakan dengan baik dan efektif. Hal ini dapat dilihat dari program-program pembangunan yang telah dijalankan, serta pembangunan sudah tepat sasaran sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Akan tetapi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa ini masih kurang efektif dalam bidang pemberdayaan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan, masyarakat kurang mengetahui pentingnya kegiatan pemberdayaan yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>x</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Sistematika Penulisan .....	6

### **BAB II URAIAN TEORITIS**

A. Efektivitas .....	8
1. Pengertian Efektivitas .....	8
2. Ukuran Efektivitas .....	10
3. Syarat Efektivitas .....	12
4. Tujuan Efektivitas .....	13
B. Konsep Anggaran.....	15
1. Pengertian Anggaran .....	15
2. Manfaat Anggaran.....	15

C. Pengelolaan Alokasi Dana Desa .....	17
1. Penggunaan Dana Desa.....	19
2. Pemantauan dan Evaluasi.....	19
D. Konsep Pembangunan.....	20
1. Pengertian Pembangunan .....	20
E. Desa.....	22
1. Pengertian Desa.....	22
2. Komponen Desa .....	23
F. Pembangunan Desa .....	25

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	30
B. Kerangka Konsep .....	30
C. Defenisi Konsep .....	32
D. Kategorisasi.....	33
E. Narasumber .....	39
F. Teknik Pengumpulan Data.....	40
G. Teknik Analisis Data.....	41
H. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	41

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Penyajian Data .....	63
B. Hasil Penelitian .....	66
C. Pembahasan.....	84



## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	87
B. Saran.....	88

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kategorisasi Penelitian.....	33
Tabel 3.2 Demografi Desa Panompuan Jae .....	44
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Desa Panompuan Jae Berdasarkan Kelompok Umur .....	45
Tabel 3.4 Keadaan Sosial Masyarakat Desa Panompuan Jae Tingkat Pendidikan.....	46
Tabel 3.5 Keadaan Sosial Masyarakat Desa Panompuan Jae Tingkat Agama .....	47
Tabel 3.6 Keadaan Ekonomi Penduduk Desa Panompuan Jae .....	48
Tabel 3.7 Sarana Prasarana Desa Panompuan Jae .....	49
Tabel 4.1 Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin .....	64
Tabel 4.2 Narasumber Berdasarkan Pendidikan .....	64
Tabel 4.3 Narasumber Berdasarkan Jabatan atau Pekerjaan .....	65
Tabel 4.4 Daftar Potensi Desa Panompuan Jae.....	76
Table 4.5 Daftar Potensi Masalah Desa Panompuan Jae .....	77

## **DAFTAR GAMBAR**

Bagan 3.1 kerangka konsep .....	31
Bagan 3.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	
Panompuan Jae .....	51

## **DAFTAR LAMPIRAN**

LAMPIRAN I	: Daftar Riwayat Hidup
LAMPIRAN II	: Daftar Wawancara
LAMPIRAN III	: SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
LAMPIRAN IV	: SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi
LAMPIRAN V	: SK-3 Permohonan Seminar Proposal Skripsi
LAMPIRAN VI	: SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
LAMPIRAN VII	: SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
LAMPIRAN VIII	: Surat Pengantar Izin Penelitian Mahasiswa
LAMPIRAN IX	: Surat Keterangan Penelitian Oleh Kantor Desa Panompuan Jae

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahan sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Dalam APBN-P 2015 telah dialokasikan Dana Desa sebesar ± Rp 20.776 triliun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia. Jumlah desa yang ada saat ini sesuai Permendagri 39 Tahun 2015 sebanyak 74.093 desa. Selain Dana Desa, sesuai Undang-undang Desa pasal 72, Desa memiliki Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer berupa Alokasi Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

Peran besar yang diterima oleh desa tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu, Pemerintah Desa harus bisa menerapkan

Prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Dalam melaksanakan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD), Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 28 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa. Alokasi Dana Desa merupakan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh Pemerintahan Daerah atau kabupaten untuk desa dengan alokasi berdasarkan besar dana minimum ditambah dengan besar alokasi dana berdasarkan variabel dan indikator.

Setelah Alokasi Dana Desa (ADD) diterima dari Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Desa akan melakukan musyawarah dengan lembaga-lembaga yang terkait dalam program pembangunan dan masyarakat. Dari musyawarah akan muncul rencana-rencana pembangunan untuk tahun yang akan datang, maka semua perangkat desa akan mengetahui berapa besar dana yang dibutuhkan dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang akan dicairkan.

Desa Panompuan Jae adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. Desa Panompuan Jae merupakan desa yang diberikan wewenang untuk melaksanakan otonomi desa. Sebagai wujud perhatian Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mengeluarkan kebijakan anggaran tentang Alokasi Dana Desa (ADD), porsi penerimaan Alokasi

Dana Desa setiap tahun berbeda, sesuai dengan kebijakan pemerintahan kabupaten itu sendiri.

Jumlah anggaran yang diberikan kepada desa Panompuan Jae melalui Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2015 mencapai Rp. 275.360.432 dan tahun 2016 mencapai Rp. 681.913.000. Dengan melihat jumlah anggaran yang begitu besar tentunya akan menghasilkan pembangunan yang maksimal. Hal ini mengingat bahwa desa yang dulunya sebelum melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sentralistis oleh satuan instansi pemerintahan, akan tetapi setelah kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) diberlakukan sekarang ini, desa mendapat alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri, sehingga keraguan terhadap kemampuan desa secara internal untuk mengelola alokasi dana tersebut masih dipertanyakan.

Selain itu desa juga banyak memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu khususnya pada organisasi pemerintahannya, sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Sejak digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Panompuan Jae pada tahun 2015 yang tampak dari kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, operasional perkantoran, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat. Di tahun 2016 kegiatan Alokasi Dana Desa yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, operasional perkantoran, belanja modal, operasional BPD, penyelenggaraan pembangunan

sarana dan prasarana kantor desa, penyelenggaraan perencanaan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat.

Namun setelah melihat hasil pembangunan yang sudah berlangsung, ternyata dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut masih belum berjalan maksimal sesuai dengan tujuan Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini dapat dilihat dari kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) bahwa kegiatan dari tahun 2015-2016 tidak banyak mengalami perubahan dan lebih banyak pembangunan di arahkan ke bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan sarana fisik desa.

Mengenai hal tersebut tentunya akan memunculkan berbagai permasalahan yang sangat menarik untuk dikaji berkaitan dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Panompuan Jae. Sehingga kegiatan penelitian tentang masalah tersebut sangat penting untuk dilakukan, yaitu dengan melakukan penelitian untuk mengamati dan mencermati proses pengelolaan Alokasi Dana Desa yang selama ini telah dilaksanakan agar dapat mengetahui apakah dalam proses tersebut berjalan dengan baik atau tidak.

Mengingat Alokasi Dana Desa sangat dibutuhkan oleh masyarakat demi tercapainya kesejahteraan dan pembangunan di Desa Panompuan Jae dan agar berjalan efektif dan efisien. Maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Efektivitas Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Panompuan Jae Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan”**.



## **B. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dilakukan sehingga peneliti dapat terarah dalam membahas masalah yang akan diteliti, maka penulis harus merumuskan masalahnya.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Panompuan Jae Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan suatu hal yang akan dicapai dalam setiap penelitian agar penelitian tersebut memiliki arah yang jelas. Tanpa adanya arah yang jelas, maka penelitian tidak akan berjalan dan mendapatkan hasil yang sebagaimana diinginkan.

Berdasarkan rumusan di atas, adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Panompuan Jae Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Secara teori, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang positif bagi kajian ilmu pengetahuan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia khususnya pada

pelaksanaan partisipasi masyarakat Desa Panompuan Jae Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.

- b. Secara praktis, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan wawasan keilmuan, pengetahuan dan sebagai suatu masukan yang positif bagi aparat Desa Panompuan Jae Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.
- c. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi wahana pengetahuan khususnya dibidang Ilmu Administrasi Negara serta bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- BAB I : Pada BAB ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- BAB II : Pada BAB ini mengemukakan tentang teori-teori yang melandasi penelitian yang akan menguraikan antara lain, Efektivitas, Konsep Anggaran Desa, Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Konsep Pembangunan, Desa, Pembangunan Desa.
- BAB III : Pada BAB ini berisikan Jenis Penelitian, Kerangka Konsep Defenisi Konsep, Kategorisasi, Narasumber, Teknik

Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Lokasi dan Waktu Penelitian.

BAB IV : pada BAB ini berisikan tentang Penyajian Data, Hasil Penelitian dan Pembahasan.

BAB V : Pada BAB ini berisikan penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **A. Efektivitas**

##### **1. Pengertian Efektivitas**

Berdasarkan (Kamus Besar Bahasa Indonesia 2003), efektivitas adalah suatu kosa kata yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti berhasil, ditaati mengesankan, mujarab dan mujur (Alwi, Hasan Dkk. 2003). Dari beberapa arti diatas maka yang paling tepat adalah berhasil dengan baik. Jika seseorang bekerja dengan baik dan mencapai tujuan seperti yang diharapkan maka dapat dikatakan pekerjaan orang tersebut efektif.

Menurut Siagian (2008), efektivitas memiliki keterkaitan terhadap penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan sebelumnya atau dapat dikatakan apakah pelaksanaan sesuatu tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Maka efektivitas adalah tercapainya berbagai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang sudah dialokasikan untuk melakukan berbagai kegiatan. Dari pengertian diatas maka terdapat empat hal yang terlihat dari efektivitas yaitu pencapaian tujuan, ketetapan waktu, mafaat dan hasil.

Pelaksanaan kegiatan selalu memakai lima macam sumber usaha, yaitu pikiran, tenaga, waktu, uang dan benda. Walaupun dalam gabungan yang berbeda untuk masing-masing jenis kegiatan, namun pada umumnya setiap masyarakat dalam melakukan suatu kegiatan tertentu menginginkan hasil yang maksimal.

Efektivitas adalah pencapaian tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya.

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketetapan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota serta merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai.(Abdurahmat, 2008)

Menurut Effendy (1989) Efektivitas adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan. Menurut pengertian diatas, indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan.

Menurut Sumaryadi (2005) mengemukakan beberapa kriteria efektivitas, yaitu kriteria jangka pendek-produksi, mutu, efisiensi, fleksibilitas dan kepuasan, pengembangan, kriteria jangka menengah-persaingan dan kriteria jangka panjang-kelangsungan hidup.

Dari beberapa pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu pekerjaan dapat dilaksanakan secara tepat, efektif, efisien apabila pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan yang telah direncanakan.

## 2. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan yang efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh Siagian (2007), yaitu :

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksud supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan,

artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat, suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat. Sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai tujuan dan sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Menurut Streers (1985) dalam bukunya “Efektivitas Organisasi”

mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut :

- a. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, pencapaian tujuan akhir semakin

terjamin, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

b. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan consensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

c. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

### **3. Syarat Efektivitas**

Menurut Sumaryadi (2010), menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas adalah :

a. Kemampuan

Kemampuan yang dimaksud diatas adalah kemampuan seseorang dalam dirinya, baik kemampuan tehnik maupun kemampuan umum. Kemampuan ini diperlukan terutama kepada atasan dalam mengarahkan anggotanya untuk mencapai hal-hal yang diinginkan.



b. Keahlian

Keahlian adalah kemampuan spesifik mengenai masalah teknis tertentu dalam pekerjaan.

c. Pengetahuan

Pengetahuan adalah merupakan suatu kemampuan yang diperoleh dan pengembangan diri melalui penelusuran keilmuan.

d. Sikap

Sikap adalah kepribadian yang tercermin dari wujud perilaku seseorang dengan sikap yang baik maka efektivitas dapat dijalankan dengan baik.

e. Motivasi

Motivasi merupakan suatu dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang untuk melakukan suatu kegiatan.

f. Stress

Stress adalah tekanan yang timbul akibat tekanan lingkungan diluar diri manusia.

#### **4. Tujuan Efektivitas**

Adapun yang menjadi tujuan dari efektivitas adalah agar tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah direncanakan secara efektif dan efisien tepat waktu dan untuk terealisasinya pelaksanaan yang baik pula.

Menurut Siagian (2007) adalah suatu ukuran pencapaian tujuan efektif atau tidak sebagaimana dikatakannya seperti berikut :

- a. Kejelasan tujuan efektif atau tidak yang hendak dicapai, hal ini dimaksud supaya dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan efektivitas, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang di ikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam strategi yang disusun untuk mencapai ke efektivitasan tersebut.
- c. Proses analisis dan perumusan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai efektif atau tidaknya tujuan itu dan strategi yang ditetapkan, artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat, suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat. Sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana.

- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka program tersebut tidak akan berjalan dengan baik.

## **B. Konsep Anggaran Desa**

### **1. Pengertian Anggaran**

Anggaran merupakan suatu alat untuk perencanaan dan pengawasan operasi keuntungan dalam suatu organisasi laba dimana tingkat formalitas suatu budget tergantung besar kecilnya organisasi. Dengan demikian, dari gambaran tersebut dapat terasa pentingnya suatu perencanaan dan pengawasan yang terbaik hanya dapat diperoleh dengan mempelajari, menganalisa dan mempertimbangkan dengan seksama kemungkinan-kemungkinan atau alternatif-alternatif.

Menurut Julita, Dkk (2014), Anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran (*Budget*) merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan yang ada dalam perusahaan yang dinyatakan dalam kesatuan unit moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu untuk masa yang akan datang.

Menurut Julita, Dkk (2014), Penganggaran adalah proses kegiatan yang menghasilkan budget sebagai hasil kerja (out put), serta proses kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi budget, yaitu fungsi pedoman kerja, alat pengkoordinasian kerja dan alat pengawasan kerja.

### **2. Manfaat Anggaran**

Dengan penyusunan anggaran usaha-usaha akan lebih banyak berhasil apabila ditunjang oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan yang terarah dan dibantu oleh

perencanaan-perencanaan sehingga dalam pelaksanaannya perusahaan-perusahaan berpegang pada suatu rencana yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan manfaat lainnya adalah membantu manager dalam mengelola perusahaan. Manager harus mengambil keputusan-keputusan yang paling menguntungkan perusahaan, seperti memilih barang atau jasa yang akan diproduksi dan dijual, memilih/menyeleksi langganan, menentukan tingkat harga metode-metode produksi, metode-metode distribusi.

Anggaran Desa disusun berdasarkan atas tujuan untuk memenuhi pembiayaan, pembangunan dan sumber-sumber dananya untuk pembangunan desa.

Secara rinci manfaat penyusunan anggaran desa adalah :

- a. Sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategi kegiatan operasional, dengan melihat kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.
- b. Sebagai salah satu indikator untuk menentukan besarnya biaya pelayanan yang akan dibebankan masyarakat.
- c. Sebagai bahan pertimbangan untuk menggali sumber pendapatan lain seperti mengajukan pinjaman.
- d. Memberikan wewenang kepada pemerintah desa dalam penyelenggaraan administrasi desa.
- e. Memberikan arahan kepada pemerintah desa dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemerintah desa.

- f. Menggambarkan kebijakan pembangunan desa dalam satu periode anggaran.
- g. Melalui perencanaan yang matang dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

### **C.Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Menurut Nurcholis (2011), Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa menentukan sukses atau tidaknya Pemerintahan Desa dalam menjalankan pemerintahan maupun pembangunan. Keuangan Desa adalah cerminan perkembangan Pemerintahan Desa, Desa dan masyarakat desa.

Menurut Widjaja (2005), Keuangan Desa adalah Pemerintah Desa menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan serta memperhatikan produksi dan keanekaragaman daerah. Desa memiliki poros yang strategis, sehingga diperlukan adanya perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah.

Sumber Keuangan Desa menurut PP. No.6 Tahun 2014 Pasal 27 terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Desa terdiri atas usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli Desa.
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.

4. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota.
5. Bantuan Keuangan dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Setiap kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa merupakan realisasi daripada rencana kegiatan Pemerintahan dan pembangunan yang dituangkan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah mempunyai kewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang desa, terutama dalam memberi pelayanan, peningkatan prasarana, peningkatan prakarsa dan pemberdayaan masyarakat dan desa yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat desa mempunyai hak untuk memperoleh bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten. Perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten selanjutnya disebut sebagai Anggaran Dana Desa (ADD) yang penyalurannya melalui kas Desa/ rekening Desa.

Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang

mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

### **1. Penggunaan Dana Desa**

Dana Desa digunakan untuk :

- a. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat.
- b. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dana Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.
- d. Prioritas penggunaan Dana Desa dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

### **2. Pemantauan dan evaluasi**

Pemantauan penyaluran Dana Desa dititik beratkan pada penetapan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan Dana Desa. Evaluasi dilakukan pada penghitungan pembagian rincian Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota dan realisasi dan penggunaan Dana Desa.

Sementara itu Bupati/Walikota mengagendakan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi SiLPA Dana Desa (sisa lebih penghitungan Anggaran Dana Desa). Jika ditemukan SiLPA lebih dari 30 persen maka Bupati/Walikota

akan meminta penjelasan kepada Kepala Desa tentang SiLPA tersebut dan/atau meminta pengawasan fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

#### **D. Konsep Pembangunan**

##### **1. Pengertian Pembangunan**

Dari berbagai sumber terutama yang beraliran ilmu ekonomi, maka pembangunan sering mempunyai pengertian merupakan suatu proses yang berkesinambungan dari peningkatan pendapatan riil perkapita melalui peningkatan jumlah dan produktivitas sumber daya.

Perkembangan pemikiran selanjutnya, pembangunan tidak hanya semata-mata berkaitan dengan peningkatan pendapatan riil saja. Bahkan secara lebih jauh konsep pembangunan menyangkut hal yang paling mendasar yaitu kualitas manusia itu sendiri. Dengan demikian konsep pembangunan kualitas sumber daya manusia yang berarti suatu upaya yang terencana untuk meningkatkan keadaan pribadi dan masyarakat pada suatu bangsa, agar berperan serta dalam menentukan masa depan yang lebih baik.

Pembangunan mengandung sejumlah tugas yang beraneka tujuan dan sasaran, berbagai keahlian, beraneka teknik/metode serta melibatkan seluruh anggota masyarakat yang ikut bergabung didalamnya.

Pembangunan merupakan suatu konsep perubahan sosial yang berlangsung terus-menerus menuju kearah perkembangan dan kemajuan dan memerlukan masukan-masukan yang menyeluruh dan berkesinambungan serta merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan negara.



Menurut Haryono (2002) pembangunan adalah suatu konsep perubahan sosial yang berlangsung terus menerus menuju kearah perkembangan dan kemajuan dan memerlukan masukan-masukan yang menyeluruh dan berkesinambungan dan merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan Negara. Oleh karena itu, pembangunan dapat diartikan sebagai suatu usaha perubahan untuk menuju keadaan lebih baik berdasarkan kepada norma-norma tertentu, perencanaan pemberdayagunaan potensi alam, manusia dan sosial budaya inilah yang disebut dengan pembangunan.

Dengan pengertian pembangunan tersebut, maka perlu dikembangkan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya seperti tanah, hutan, sumber air dan sebagainya. Suatu hal pokok adalah membangun potensi manusia itu sendiri berupa jumlah penduduk yan terlalu besar harus dikendalikan, ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam tersebut di atas secara optimal. Dengan demikian, pembangunan nasional suatu bangsa yang bersangkutan untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin yang pada dasarnya bukan saja menjadi idaman dari setiap warga negara dan bangsa, melainkan merupakan cita-cita setiap manusia di manapun berada.

Pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Nation Building). (Siagian : 1988)

Dengan demikian kiranya jelas bahwa suatu bangsa yang sedang membangun tidak mungkin dan tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa bangsa itu bersikap acuh tak acuh terhadap pembangunan. Menyerahkan pembangunan-pembangunan itu hanya kepada pemerintah adalah suatu hal yang perlu dicegah. Pada hakekatnya partisipasi seluruh masyarakat (*societal participation*) merupakan salah satu tugas kewajiban setiap anggota masyarakat.

Dalam hal ini memang harus diakui bahwa peranan pemerintah dalam kegiatan-kegiatan pembangunan adalah sangat penting dalam menentukan pembangunan. Meski peranan pemerintah itu demikian pentingnya, namun seluruh unsur masyarakat harus turut serta jika proses pembangunan itu hendak berjalan lancar.

Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro. Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (progress), pertumbuhan dan visifikasi.

## **E. Desa**

### **1. Pengertian Desa**

Perdesaan berasal dari kata desa. Kata yang berasal dari bahasa Jawa. Desa dalam bahasa etnik yang terdapat di Indonesia di kenal dalam berbagai istilah, seperti batak dikenal dengan huta atau kuta, minangkabau dikenal sebagai

nagawari, aceh disebut dengan gampong, bugis dikenal dengan matowa, Makassar disebut dengan gukang atau minahasa disebut dengan wanua.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa desa merupakan suatu kesatuan masyarakat yang dibangun berdasarkan sejarah, nilai-nilai, budaya, hukum dan keistimewaan tertentu yang diakui dalam sistem kenegaraan kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengorganisir dan menetapkan kebutuhan masyarakatnya secara mandiri.

## **2. Komponen Desa**

Desa merupakan suatu subsistem dari keseluruhan yang lebih luas yang dinamakan Negara. Desa sebagai suatu sistem memiliki komponen baik fisik, manusia dan kelembagaan sosial.

Wahjudin (2011) secara rinci menguraikan komponen Desa sebagai berikut:

### **a. Sumber Daya Pertanian dan Lingkungan Hidup**

Perdesaan memiliki sumber daya pertanian dan lingkungan hidup sebagai penyangga kehidupan dan perekonomian masyarakat. Desa memiliki peran ganda sebagai penopang interaksi sosial dan peningkatan kesejahteraan,

juga sebagai penyeimbang ekosistem lingkungan yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia. Peran sumber daya dan lingkungan hidup kerap kali menjadi hambatan dalam pengembangan pertanian, melalui kearifan dan pendekatan lingkungan yang berkelanjutan pembangunan desa dewasa ini sangat penting untuk kelestarian alam.

#### b. Perekonomian Wilayah Perdesaan

Perekonomian wilayah perdesaan menyangkut kebutuhan pasar di luar daerah berupa komoditi primer dan sekunder. Keterkaitan pola produksi mendorong integrasi kuat desa dengan wilayah lainnya. Ciri penting kegiatan ekonomi perdesaan yaitu kegiatan pertanian yang maju dan menggunakan perlengkapan atau teknologi pendukung sederhana yang tersedia di wilayahnya. Pengelola perlu dilakukan secara intensif dengan tenaga kerja relatif banyak (padat karya). Hasil pertanian harus segera dipasarkan ke luar daerah dalam bentuk olahan segar untuk memancing konsumen.

#### c. Kelembagaan Sosial

Kegiatan perekonomian di perdesaan ditandai dengan eratnya hubungan petani, pedagang, peternak, penyebaran inovasi, pengelolaan sarana produksi pertanian lokal dan transportasi. Disamping itu, lembaga sosial yang ada seperti kelompok tani, kelompok pemuda, pemerintah desa badan permusyawaratan desa, pesantren dan pendidikan formal, serta lembaga keuangan mikro berkaitan erat dengan peningkatan produksi pertanian dan kehidupan masyarakat setempat. Kelembagaan tersebut berpengaruh terhadap distribusi dan peningkatan pendapatan masyarakat perdesaan.

#### d. Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia di wilayah pedesaan menjadi subjek atau pelaku utama yang menggerakkan roda perekonomian dan perubahan dalam jangka panjang. Sebagian besar mengendalikan sektor pertanian dan sangat terpengaruh dengan perubahan kebijakan yang berskala nasional, regional dan global. Sebagian penduduk desa adalah petani yang berperan sebagai produsen sekaligus konsumen. Oleh karena itu, kualitas petani sebagai subjek sangat ditentukan oleh kemampuan manajerial, keterampilan teknis dan antisipasi terhadap perubahan. Sementara sebagai konsumen, kualitasnya sangat ditentukan oleh tingkat pemenuhan kebutuhan fisik minimum.

#### e. Sarana dan Prasaran Fisik

Disamping aktivitas sosial dan kelembagaan, Desa ditunjang pula oleh ketersediaan sarana dan prasarana fisik untuk mendukung percepatan pembangunan dan perekonomian masyarakat serta untuk meningkatkan hubungan dan jaringan antara satu desa dengan desa lainnya. Komponen ini secara fungsional dibedakan menjadi, sarana fisik penunjang produksi dan aktivitas sosial. Komponen prasarana fisik mencakup pelayanan di bidang ekonomi, seperti jalan Desa, jembatan, irigasi dan pabrik pengolahan pertanian. Di bidang kesehatan tersedianya sarana posyandu, sanitasi dan air bersih. Di bidang pendidikan tersedianya sekolah dasar, pesantren dan madrasah.

### **F. Pembangunan Desa**

Pembangunan Desa adalah pembangunan yang berbasis pedesaan dengan mengutamakan kearifan lokal masyarakat pedesaan. Pembangunan yang berbasis

pedesaan diberlakukan untuk memperkuat potensi perekonomian Negara, mempercepat penuntasan kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan perkembangan antar wilayah, sebagai solusi bagi perubahan sosial dan desa.

Dalam realisasinya, pembangunan pedesaan memungkinkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi digerakkan ke pedesaan sehingga desa menjadi tempat yang menarik sebagai tempat tinggal mencari penghidupan. Infrastruktur desa seperti irigasi, sarana dan prasarana transportasi, listrik, sarana pendidikan, kesehatan dan sarana-sarana lainnya yang dibutuhkan harus dapat dipenuhi sehingga memungkinkan desa menjadi maju dan berkembang.

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang disengaja atau disadari untuk mencapai suatu arah yang positif bagi anggota masyarakat secara keseluruhan. Pemahaman konsep pembangunan seperti ini meletakkan konsep pembangunan bersifat netral dan tidak etnosentris terhadap suatu arah tertentu dari perkembangan masyarakat.

Menurut Damsar (2016), pembangunan perdesaan merupakan suatu proses perubahan yang disengaja atau disadari untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh anggota masyarakat perdesaan secara keseluruhan. Pembangunan perdesaan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat perdesaan secara holistik komprehensif meliputi aspek ekonomi, sosial, politik, budaya, agama, pertahanan dan keamanan.

Pembangunan Desa bertujuan untuk mensejahterakan warga desa dengan cara melaksanakan pembangunan infrastruktur desa seperti sarana pendidikan,

tempat ibadah, jalan serta prasarana lainnya yang dilakukan oleh pemerintah desa bahkan juga dengan swadaya masyarakat itu sendiri.

Pembangunan Desa hendaknya dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, akses terhadap pengambilan keputusan, berdaya saing maupun peningkatan indeks pembangunan manusia di desa tersebut.

Pembangunan Desa merupakan kegiatan dalam pembangunan dimana terintegrasinya usaha-usaha pemerintah desa dan masyarakat desa dengan maksud tujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan nasional. Dalam pembangunan desa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah :

#### 1. Pembangunan Infrastruktur Desa

Pembangunan Infrastruktur Desa diharapkan akan mewujudkan akses antar desa, kecamatan dan kabupaten serta memaksimalkan aspek aksesibilitas dan produktivitas disemua sektor. Lemahnya infrastruktur desa mengakibatkan terjadinya kepincangan dalam mengelola potensi dan kekuatan pembangunan. Pembangunan yang tidak kreatif dan inovatif akan menimbulkan pemborosan besar dan menjadikan pembangunan tidak terarah. Akibatnya masyarakatlah yang dirugikan.

#### 2. Membangun Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia sangat berperan penting dalam pembangunan. Kompetensi dan keterampilan sumber daya manusia berkaitan

dengan bidang tugasnya dalam pelayanan publik dan pembangunan yang berkualitas bagi kepentingan masyarakat.

### 3. Membangun Ekonomi Desa Melalui Sektor Ekonomi Kerakyatan

Proses pembangunan yang selama ini terjadi, meski sudah mengelola potensi yang ada tetap saja tidak memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat. Daya dorong hasil pembangunan terhadap produktivitas terhadap masyarakat pada umumnya masih tergolong rendah. Salah satu penyebabnya karena rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Kekuatan kerakyatan diharapkan mampu merangsang investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi ideal demi terwujudnya pemerataan hasil pembangunan yang akan dirasakan sebagai sebuah kesejahteraan oleh masyarakat.

### 4. Membangun Sektor Pemerintahan

Selama ini birokrasi desa hanya bekerja sebagai formalitas saja dan jauh dari harapan untuk membangun desanya. Pemerintah desa pada umumnya belum bisa menjalankan fungsinya untuk menyejahterakan masyarakat. Perhatian pemerintah terhadap desanya sudah cukup besar akan tetapi perhatian tersebut tidak dibarengi dengan sistem dan mekanisme pelaksanaan yang tepat. Untuk itu perlu adanya penyesuaian mekanisme, fungsi dan tugas Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) dalam memusatkan perhatian untuk pembangunan desanya.

Dalam melaksanakan pembangunan pedesaan diperlukan kerjasama yang baik antara daerah dengan daerah lain. Dalam hal ini perlu diperhatikan kesesuaian antara kota dengan pedesaan sekitarnya dan antara satu kota dengan kota-kota sekitarnya. Hal ini disebabkan karena pada umumnya lokasi pertanian



dan lokasi industri atau sektor-sektor lainnya yang cenderung terkonsentrasi hanya pada beberapa daerah administrasi yang berdekatan. Dengan adanya kerja sama antara satu daerah dengan daerah lain maka daerah-daerah yang dimaksud dapat tumbuh dan termotivasi.

Sedangkan pembangunan pedesaan secara spesial adalah untuk terciptanya kawasan pedesaan yang mandiri, berwawasan lingkungan, selaras, serasi dan bersinergi dengan kawasan-kawasan lainnya melalui pembangunan holistik dan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera.

Jadi dapat dikatakan bahwa, pembangunan desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta untuk mencapai kondisi sosial dan ekonomi yang lebih baik dan tentunya juga diikuti dengan peningkatan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di desa sesuai dengan kebutuhan yang seharusnya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan dengan cara menggambarkan keadaan objek peneliti pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan dan data yang sifatnya hanya menggolongkan. (Rachmad 2006).

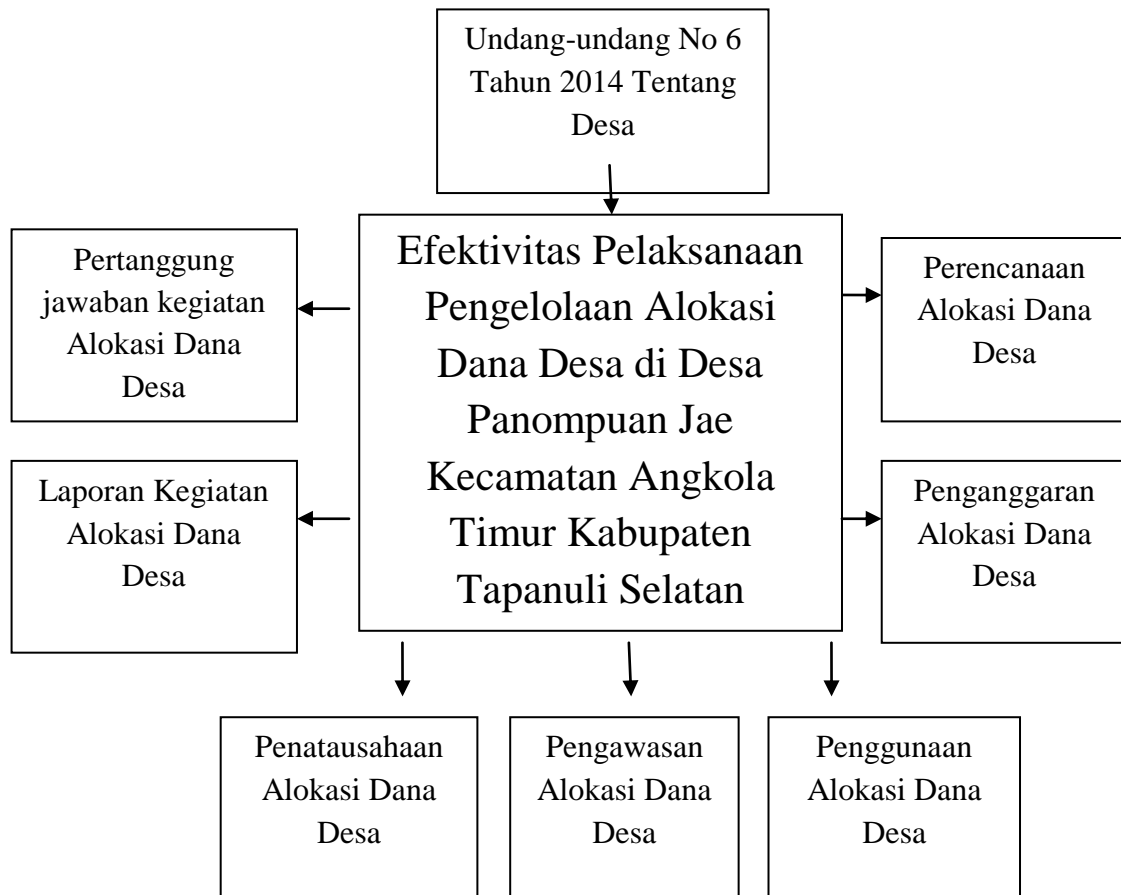
Dengan demikian penelitian ini akan menggambarkan efektivitas pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Panompuan Jae Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.

#### **B. Kerangka Konsep**

Konsep yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Panompuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. Agar konsep tersebut dapat dijelaskan maka kerangka konsep dirangkum dan digambarkan dalam model teoritis sebagai berikut:

### Bagan 3.1

#### Kerangka Konsep



#### C. Defenisi Konsep

Untuk memperjelas dan menyederhakan beberapa konsep uraian teoritis dalam penelitian maka peneliti menyederhanakan beberapa konsep tersebut sebagai berikut :

1. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.

2. Konsep Anggaran Desa adalah merupakan suatu cara manajemen dalam menjalankan fungsinya yaitu fungsi perencanaan dan fungsi pengendalian. Anggaran sebagai fungsi perencanaan diharapkan dalam waktu yang akan datang keberhasilan yang dicapai sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Sedangkan anggaran sebagai fungsi pengendalian diharapkan dengan penyusunan anggaran tidak menggunakan dana yang ada dengan tidak semestinya.
3. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh pemerintahan desa yang diprioritaskan untuk pembangunan desa dan untuk apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat desa.
4. Konsep pembangunan adalah suatu upaya yang dilakukan secara sadar untuk proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertanahan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan budaya.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.
6. Pembangunan Desa adalah pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat yang ada di desa. Berdasarkan kebutuhan dari masyarakat setempat.

#### D. Kategorisasi

Adapun kategorisasi dari efektivitas pelaksanaan pengelolaan anggaran Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Panompuan Jae Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan adalah :

**Tabel 3.1**

#### **Kategorisasi Penelitian**

No	Uraian Teoritis	Kategorisasi
1.	Efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa	a. Mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Desa b. Pencapaian tujuan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa c. Transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa
2.	Peningkatan Pembangunan	a. Pembangunan sarana fisik b. Pemberdayaan masyarakat c. Pembinaan masyarakat

Secara garis besar, kedua kategorisasi di atas dapat di rumuskan sebagai berikut :

#### 1. Efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa

- a. Mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Desa

Penyaluran Dana Desa tahap pertama kepada pemerintah desa oleh pemerintah pusat sudah mulai dilaksanakan. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, Dana Desa tahun 2016 ini di prioritaskan penggunaannya untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Untuk mendukung sosialisasi dan memperkuat pengawasan Dana Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah membentuk Satgas Desa. Satgas Desa juga akan membantu identifikasi berbagai permasalahan yang menyumbat Alokasi Dana Desa. Selain itu, Kemendesa juga membuka ruang bagi masyarakat yang hendak menyampaikan pengaduan penyelewengan Dana Desa dengan menghubungi Call Center 1500040.

b. Pencapaian tujuan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa

Penyaluran Dana Desa menjadi hal terpenting untuk pembangunan Desa yang lebih maju. Dana Desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari Dana Desa pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih pemerataan pendapatan.

Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan, meningkatkan kapasitas warga dalam

pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan serta perluasan skala ekonomi individu warga.

Pemerintah memprioritaskan pemanfaatan Dana Desa untuk proyek seperti pembangunan pendidikan anak usia dini dan posyandu. Prioritas lainnya adalah pembangunan infrastruktur, misalnya irigasi pertanian, jalan, usaha tani, saluran air dan jembatan.

c. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Salah satu prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik adalah transparansi dalam hal keuangan. Untuk memegang dan melaksanakan prinsip ini, maka harus selalu diterapkan dalam mengatasi setiap masalah keuangan Desa. Salah satu contoh penerapan misalnya bukti transaksi. Bukti transaksi berperan penting sebagai alat koreksi untuk mencocokkan antara catatan transaksi keuangan yang di tuliskan dengan bukti transaksi yang dimiliki pengelolaan keuangan Desa perlu diterapkan.

Prinsip atau asas transparansi sendiri adalah sikap membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dalam setiap tahapnya, baik dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggung

jawaban, maupun hasil pemeriksaan dengan tahap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan rahasia Desa.

Prinsip berikutnya yang harus dilaksanakan bersamaan dengan transparansi adalah prinsip memegang akuntabilitas, Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat. Pada dasarnya pengelolaan keuangan Desa mengutamakan kepatuhan dan kesesuaian peraturan-perundangan. Pengelolaan keuangan desa juga harus dilakukan secara berkelanjutan.

## 2. Pelaksanaan pembangunan

### a. Pembangunan Sarana Fisik

Pembangunan fisik yang dimaksud adalah pembangunan sarana dan prasarana yang di lakukan di Desa Panompuan Jae Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan, setiap kegiatan atau rentetan dari usaha proses pembangunan harus dikembangkan untuk meningkatkan nilai-nilai dan objek yang dilaksanakan agar dapat berubah kearah yang lebih baik sesuai dengan tujuan yang dikehendaki.

Untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditentukan dalam pembangunan fisik harus memperhatikan dan menentukan sifat dan bentuk dari objek, demikian pula dengan informasi yang jelas tentang tentang hal-hal yang menyangkut pembangunan fisik.



Setiap pembangunan fisik yang dilaksanakan harus memperhatikan hal-hal yang terdapat dalam perencanaan seperti dana, lokasi dan waktu pelaksanaan, keuntungan yang diterima masyarakat, sifat dan bentuk dari proyek itu sendiri, agar apa yang diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan akan berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat.

Jadi pembangunan fisik adalah rentetan kegiatan atau proses yang bisa meningkatkan nilai-nilai suatu objek yang lebih tinggi dengan mengarah kepada hal yang lebih tinggi lagi baik itu berupa pengadaan prasarana di Desa Panompuan Jae Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.

#### b. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/ kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*), dan mengurangi kekuasaan (*disempowered*) kepada pihak yang terlalu berkuasa (*powerfull*) sehingga terjadi keseimbangan. Pengertian pemberdayaan (*empowerment*) tersebut menekankan pada aspek pendelegasian kekuasaan, memberi wewenang atau pengalihan kekuasaan kepada individu atau masyarakat sehingga mampu mengatur diri dan lingkungannya sendiri dengan keinginan, potensi dan kemampuan yang dimilikinya.

Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran

sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing.

Satu diantara rentetan program pemberdayaan itu adalah pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Kendatipun demikian, masih banyak kelemahan yang muncul ketika dana ini di manfaatkan untuk kepentingan pemberdayaan dan pembangunan. Kelemahan itu akan menimbulkan persoalan seperti penyelewengan dana sehingga penggunaannya tidak tepat sasaran sebagaimana diharapkan sebelumnya. Hal ini, diakibatkan oleh ketidakmampuan para aktor pengelola dana yang melibatkan aparat desa yang faktanya belum memiliki kompetensi yang cukup untuk mengelola dana itu. Kondisi inilah yang menyebabkan banyak program pemberdayaan oleh pemerintah gagal dalam implementasinya.

#### c. Pembinaan Masyarakat

Pembinaan adalah suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang sudah di miliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum di miliki, dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya, untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang dijalani seara lebih efektif.

Dalam pembinaan terjadi proses melepas hal-hal yang dimiliki, berupa pengetahuan dan praktek yang sudah tidak membantu dan menghambat hidup dan

kerja, dan mempelajari pengetahuan dan praktek baru yang dapat meningkatkan hidup dan kerja. Tujuannya agar orang yang menjalani pembinaan mampu mencapai tujuan hidup atau kerja yang digulumi secara lebih efisien dan efektif dari sebelumnya.

Pembinaan masyarakat yang diadakan di Desa Panompuan Jae meliputi beberapa bidang yaitu pembinaan keagamaan, pembinaan pkk, pembinaan anak remaja.

#### **E. Narasumber**

Menurut Sugiono (2009), penentuan sampel narasumber dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum. Dalam penelitian ini data-data yang diperoleh dari narasumber adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam efektivitas pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Panompuan Jae Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. Kriteria memilih narasumber adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki posisi yang penting di instansi yang bersangkutan.
- b. Mengetahui dengan baik mengenai permasalahan yang akan diteliti.

Narasumber yang dipilih dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Desa (Samsul Marif Hasibuan)
2. Bendahara Desa (Jul Sahril Hasibuan)
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (Ridwan Simamora)
4. Ketua LKMD (Ali Gebri)
5. Tokoh Masyarakat (Irsan Hasibuan)

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik :

### **a. Data Primer**

Data primer adalah pengumpulan data yang dilakukan atau diperoleh secara langsung dilapangan atau penelitian melalui wawancara. Suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data secara langsung melalui percakapan atau tanya jawab antara dua orang atau lebih, khususnya tentang efektivitas pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Panompuan Jae Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah suatu teknik pengumpulan data lapangan dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis (diurai), dibandingkan dan dipadukan membentuk suatu kajian yang sistematis, padu dan utuh.

## **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis yang dilakukan dengan meringkas data atau menyeleksi data, disederhanakan kemudian diambil makna utamanya. Data yang disajikan berdasarkan fakta-fakta yang ada dilapangan. Sehingga memberikan gambaran tentang bagaimana pelaksanaan pembangunan di Desa Panompuan Jae Kecamatan

Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan, lalu ditarik kesimpulan dari apa yang terjadi.

## **H. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Adapun lokasi yang akan menjadi tempat penelitian penulis adalah Desa Panompuan Jae Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan provinsi Sumatera Utara dan waktu penelitian mulai dari Desember 2016 sampai dengan Februari 2017.

### **1. Visi dan Misi Desa Panompuan Jae**

#### **a. Visi**

Berdasarkan analisis terhadap kondisi obyektif dan potensi yang dimiliki Desa Panompuan Jae dengan mempertimbangkan kesinambungan pembangunannya, maka Visi Desa Panompuan Jae tahun 2016-2022 adalah sebagai berikut:

Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Religius dan Intelektual Melalui Peningkatan Usaha Pertanian.

Visi tersebut memiliki empat pokok pikiran yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Sejahtera, yaitu merupakan cita-cita dan perwujudan masyarakat Desa Panompuan Jae yang terbebas dari ketergantungan dan ketertinggalan terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya baik primer maupun sekunder.

- 2) Religius, yaitu merupakan cita-cita dan perwujudan masyarakat Desa Panompuan Jae yang memiliki akhlak mulia dengan meletakkan pondasi agama sebagai landasan dalam berpikir dan bertindak dalam segala aspek kehidupan.
- 3) Intelektual, yaitu kondisi Pemerintah Desa dan masyarakat desa yang sumber daya manusi yang cerdas dan berkualitas serta berbudi pekerti yang luhur.
- 4) Pengembangan Potensi Pertanian, yaitu target dan sasaran prioritas pembangunan dibidang usaha pertanian sebagai potensi unggulan desa.

**b. Misi**

Untuk mencapai visi mewujudkan masyarakat sejahtera yang religius dan intelektual melalui peningkatan usaha pertanian tersebut di atas, Desa Panompuan Jae telah menetapkan misi sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan perekonomian masyarakat yang tangguh dan berdaya saing berbasis potensi local
  - 2) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dan sarana umum
  - 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang amanah dan berakhlak mulia
  - 4) Memfasilitasi pelatihan-pelatihan tentang berwirausaha
  - 5) Memfasilitasi pengembangan dan peningkatan hasil pertanian
- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa

## 2. Sejarah Singkat Desa Panompuan Jae

Desa Panompuan Jae merupakan salah satu desa dalam kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara, secara administratif wilayah Desa Panompuan Jae memiliki batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Berbatasan dengan Sampuaran Simarloting

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Morang

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Ulu Sihapas

Sebelah Barat : Berbatasan Dengan Desa Panompuan

Luas wilayah desa Panompuan Jae adalah 900 Ha yang terdiri dari 40% berupa pemukiman, 40% berupa daratan yang digunakan untuk lahan pertanian, serta 20% berupa lahan perkebunan karet, sawit dan palawija. Sebagaimana wilayah teropis, desa Panompuan jae mengalami musim kemarau dan musim penghujan dalam setiap tahunnya. Rata-rata perbandingan musim penghujan lebih besar daripada musim kemarau, hal itu disebabkan karena wilayah yang masih hijau dengan vegetasi serta relatif dekat dengan wilayah hutan.

Jarak pusat desa dengan ibu kota kabupaten yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat kurang lebih 16 km. kondisi prasarana jalan poros desa yang melalui jalan provinsi dengan kondisi sangat bagus sehingga waktu tempuh menggunakan kendaraan bermotor mencapai waktu kurang lebih 1 jam. Sedangkan jarak pusat desa dengan ibu kota kecamatan yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat kurang lebih 9 km. kondisi ruas jalan poros desa yang dilalui juga berupa jalan provinsi dengan kondisi sangat bagus sehingga waktu tempuh menggunakan kendaraan bermotor mencapai kurang lebih 30 menit.

Desa Panompuan Jae merupakan wilayah yang memiliki potensi untuk usaha pertanian, perkebunan karet, sawit dan Palawija. Hal tersebut didukung oleh kondisi geografis serta sistem pengairan yang baik.

### 3. Demografi

Demografi adalah studi ilmiah tentang penduduk, terutama tentang jumlah, struktur dan perkembangannya. Berdasarkan data profil desa, jumlah penduduk desa panompuan Jae adalah 1206 jiwa dengan komposisi tersaji dalam tabel berikut :

**Tabel 3.2**

**Demografi Desa Panompuan Jae**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	684
2.	Perempuan	660
3.	Kepala Keluarga	318

Sumber: Kantor Kepala Desa Panompuan Jae

**Tabel 3.3**

**Jumlah Penduduk Desa Panompuan Jae Berdasarkan Kelompok Umur**

No	Kelompok Umur	Jumlah Jiwa
1.	0-9 Tahun	283



2.	10-19 Tahun	320
3.	15-24 Tahun	276
4.	25-34 Tahun	201
5.	35-44 Tahun	249
6.	45-54 Tahun	119
7.	55-64 Tahun	53
8.	65-74 Tahun	21
9.	75 ke atas	17
Total		1344

Sumber: Kantor Kepala Desa Panompuan Jae

#### 4. Keadaan Sosial

Adanya fasilitas pendidikan yang memadai serta pemahaman masyarakat tentang pentingnya menempuh pendidikan formal maupun nonformal memengaruhi peningkatan taraf pendidikan. Agama, kebudayaan, adat istiadat dan kebiasaan yang ada juga beragam. Secara detail, keadaan sosial penduduk desa Panompuan Jae tersaji dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.4****Keadaan Sosial Masyarakat Desa Panompuan Jae Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	Belum Sekolah	378 Jiwa	
2.	SD/ Sederajat	218 Jiwa	
3.	SMP/ Sederajat	213 Jiwa	
4.	SMA/ Sederajat	299 Jiwa	
	Diploma/ Sederajat	36 Jiwa	

Sumber: Kantor Kepala Desa Panompuan Jae

**Tabel 3.5****Keadaan Sosial Masyarakat Desa Panompuan Jae Tingkat Agama**

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Islam	1307 Jiwa	
2.	Kristen Katolik	36 Jiwa	
3.	Kristen Protestan	1 Jiwa	
4.	Hindu	–	
5.	Budha	–	
6.	Konghucu	–	

Sumber: Kantor Kepala Desa Panompuan Jae

## 7. Keadaan Ekonomi

Wilayah desa Panompuan Jae Memiliki Berbagai potensi yang baik, potensi tersebut dapat meningkatkan taraf perekonomian dan pendapatan masyarakat. Di samping itu, lokasi yang relatif dekat dengan ibu kota kabupaten dan pusat kegiatan perekonomian, memberikan peluang kehidupan yang lebih maju dalam sektor formal maupun non formal. Tabel berikut menyajikan data keadaan ekonomi penduduk desa Panompuan Jae:

**Tabel 3.6**

### **Keadaan Ekonomi Penduduk Desa Panompuan Jae**

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
A.	Mata Pencaharian		
1.	Belum Bekerja	558 Jiwa	
2.	Mengurus Rumah	176 Jiwa	
3.	Pelajar	221 Jiwa	
4.	Pensiunan	1 Jiwa	
5.	PNS	18 Jiwa	
6.	Karyawan Swasta	9 Jiwa	
7.	Buruh Tani	18 Jiwa	
8.	Guru	4 Jiwa	
9.	Bidan	–	
10.	Supir	2 Jiwa	
11.	Wiraswasta	7 Jiwa	

Sumber: Kantor Kepala Desa Panompuan Jae

## 8. Sarana Prasarana dan Infrastruktur

Sebagai desa yang berkembang di desa Panompuan Jae terdapat hasil pembangunan sarana dan prasarana seperti tersaji dalam tabel berikut :

**Tabel 3.7**

### **Sarana Prasarana Desa Panompuan Jae**

No.	Sarana/Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Balai Desa	1Unit	Menumpang Balai
2.	Kantor Desa	1 Unit	
3.	Polindes	1 Unit	
4.	Masjid	2 Unit	
5.	Mushollah	3 Umit	
6.	Tempat Pemakaman Umum	2 Unit	
7.	Pos Kamling	2 Unit	Setiap RT
8.	TK/PAUD	1 Unit	
9.	SD/Sederajat	1 Unit	
10.	SMP/Sederajat	1 Unit	
11.	Posyandu	1 Unit	
12.	Jalan Aspal Penetrasi	1 Unit	
13.	Jalan Sirtu/Koral	1 Unit	
14.	Jalan Rabat Beton	2 Unit	
15.	Jalan Tanah	2 Unit	

Sumber: Kantor Kepala Desa Panompuan Jae

## **8. Struktur Organisasi**

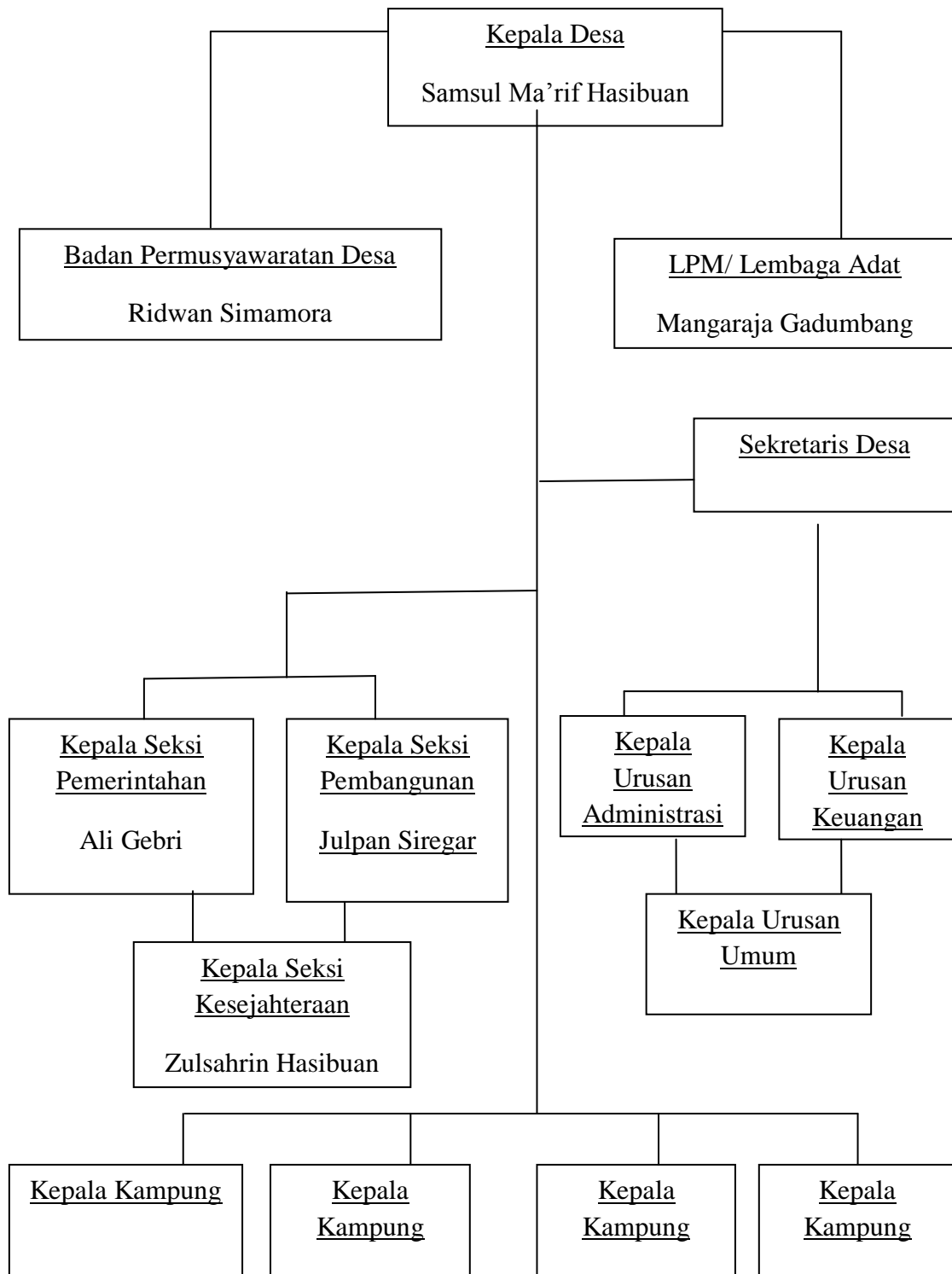
Organisasi merupakan fungsi manajemen yang mempunyai peranan dan berkaitan langsung dengan interaksi sosial yang terjadi diantara individu-individu dalam rangka kerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Struktur organisasi departemen merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu departemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya struktur organisasi, maka akan jelas pemisahan tugas dari masing-masing sampai unit-unit terkait dalam suatu organisasi.

Adapun organisasi itu adalah penggabungan orang dan tugas-tugas yang saling berhubungan erat satu dengan yang lainnya agar departemen dapat dipimpin. Departemen harus memiliki struktur organisasi yang nyata, dimana perbandingan antara tugas dan tanggung jawab dapat terlihat jelas. Dengan demikian hubungan yang baik dalam rangka merealisasikan tujuan departemen, sehingga program kerja dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.

Struktur organisasi ini juga dapat mempermudah pelaksanaan tugas-tugas di Kantor Kepala Desa Panompuan Jae Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan, sehingga diperlukan struktur organisasi yang terorganisir. Struktur organisasi Pemerintahan Desa Panompuan Jae menganut sistem kelembagaan pemerintahan desa dengan pola minimal sebagaimana tersaji dalam bagan berikut ini:

Bagan 3.2

## Struktur Organisasi Pemerintahan Desa panompuan jae



Sumber: Kantor Kepala Desa Panompuan Jae

## 1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berikut adalah uraian dari struktur organisasi Pemerintahan Desa Panompuan Jae:

### a) Tugas Pemerintahan Desa

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kegiatan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- 2) Mengajukan rencana peraturan desa
- 3) Menetapkan peraturan desa
- 4) Mengajukan rencana APBDes
- 5) Membina kehidupan masyarakat desa
- 6) Membina perekonomian desa
- 7) Mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif dan swadaya masyarakat
- 8) Meningkatkan kesejahteraan rakyat
- 9) Ketentraman dan ketertiban
- 10) Menjalin hubungan kerja sama dengan mitra pemerintahan desa
- 11) Pengembangan pendapatan desa dan sebagainya

### b) Kepala Desa mempunyai tugas:

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan
- 2) Menyelenggarakan urusan pemerintahan, dan
- 3) Menyelenggarakan urusan kemasyarakatan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Desa mempunyai wewenang sebagai berikut:

Kepala Desa mempunyai wewenang:

- 1) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- 2) Mengajukan rancangan Peraturan Desa (perdes)
- 3) Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes untuk di bahas dan di tetapkan bersama BPD
- 5) Membina kehidupan masyarakat desa
- 6) Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif
- 7) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 8) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepala Desa mempunyai kewajiban:

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara kutuhan Negara Republik Indonesia
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- 3) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
- 4) Melaksanakan kehidupan demokrasi



- 5) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme
- 6) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa
- 7) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan
- 8) Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik
- 9) Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa
- 10) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa
- 11) Mendamaikan perselisihan masyarakat desa
- 12) Mengembangkan pendapatan masyarakat desa
- 13) Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat
- 14) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa
- 15) Mengembangkan potensi dan sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
- 16) Membuat laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati
- 17) Memberi laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD
- 18) Menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat
- 19) Membuat laporan akhir tahun masa jabatan kepada bupati

Perangkat desa mempunyai tugas sebagai berikut:

c) Sekretaris Desa

Membantu Kepala Desa melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan administrasi organisasi dan tata laksana serta memberikan

pelayanan administratif kepada seluruh perangkat desa dan masyarakat desa yang bersangkutan. Adapun tugas pokok dan fungsi sekretaris desa adalah sebagai berikut:

a) Tugas Sekretaris Desa

- 1) Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data untuk kelancaran kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
- 2) Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan
- 3) Pelaksanaan administratif umum
- 4) Pelaksanaan administratif pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
- 5) Menyusun dan mengkoordinasikan program kerja, pelaksanaan tugas sekretariat
- 6) Menyusun rencana kebutuhan, perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor
- 7) Menyusun dan mengkoordinir kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa
- 8) Menyusun dan memproses Rancangan Produk Hukum Desa (Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa)
- 9) Menyelenggarakan Tata Usaha Kepegawaian (Aparatur Desa) yang meliputi kesejahteraan kerja, pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.
- 10) Menyelenggarakan Penyusunan Rencana Anggaran Pengelolaan Keuangan serta pertanggung jawaban pelaksanaannya

- 11) Melakukan pelayanan teknis administrasi kepada masyarakat
- 12) Menyusun program tahunan desa (RPJMDes-RKPDDes)
- 13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa, dalam hal kepala desa berhalangan.

d) Tugas Kaur Pemerintahan

Membantu Kepala Desa dalam tugas pelayanan, pemberdayaan dan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa, sedangkan tugas pokok dan fungsi kaur pemerintahan sebagai berikut :

- 1) Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan Pemerintahan Desa
- 2) Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
- 3) Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan Kegiatan Sosial Politik Ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa
- 4) Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa
- 5) Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan pemerintahan Desa
- 6) Menyelenggarakan kegiatan yang terkait dengan bidang pertahanan dan kependudukan
- 7) Merumuskan upaya terciptanya ketentraman, ketertiban dan pembangunan kesatuan bangsa di desa

- 8) Menyelenggarakan kegiatan yang terkait dengan urusan organisasi social kemasyarakatan dan adat istiadat
  - 9) Melakukan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan dusun
  - 10) Melakukan kegiatan yang terkait dengan pernyataan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Keputusan Desa dan Keputusan Kepala Desa
  - 11) Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sehat dan dinamis
  - 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa
- e) Tugas Kaur Umum :

Tugas pokok Kaur Umum adalah “membantu Kepala Desa dalam tugas pelayanan, pemberdayaan dan penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan desa. Adapun fungsi Kaur Umum diantaranya :

- 1) Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data yang terkait dengan penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan desa
- 2) Melaksanakan tertib administrasi umum dan keuangan
- 3) Melaksanakan urusan perlengkapan dan inventaris desa
- 4) Melaksanakan urusan rumah tangga desa
- 5) Melaksanakan penataan rapat dan upacara
- 6) Melaksanakan penataan arsip
- 7) Mengumpulkan dan menyusun bahan laporan Pemerintahan Desa
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

f) Tugas Kaur Keuangan:

Tugas pokok Kaur Keuangan adalah “ membantu Kepala Desa dalam tugas pelayanan, perencanaan dan penyelenggaraan Program Desa” tugas pokok dan fungsi keuangan desa sebagai berikut :

- 1) Mengumpulkan dan memformulasikan data untuk bahan penyusunan program dan perencanaan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa
- 2) Menyusun program kerja pelaksanaan tugas dan perencanaan desa
- 3) Mengumpulkan dan menyiapkan penyusunan program kerja pelaksanaan tugas kerja bersama
- 4) Melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya
- 5) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan desa
- 6) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan perencanaan

g) Tugas Kaur Pembangunan:

Tugas pokok kaur pembangunan “ membantu kepala desa dalam tugas pelayanan, pemberdayaan dan penyelenggaraan pembangunan di desa” adapun fungsi kaur pembangunan adalah sebagai berikut:

- 1) Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data yang terkait dengan penyelenggaraan pembangunan desa
- 2) Mendorong dan menggairahkan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat desa

- 3) Menyelenggarakan mekanisme perencanaan musyawarah pembangunan desa
  - 4) Mendorong kegiatan perkoperasian, perdagangan, dunia usaha dan keterampilan rakyat
  - 5) Melakukan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan kelompok tani dan ternak, pkk dan organisasi profesi
  - 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa
- h) Tugas Kaur Kesejahteraan Rakyat (Kesra):
- 1) Mengumpulkan dan mengevaluasi data dibidang kesejahteraan rakyat
  - 2) Melakukan pembinaan dibidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana, psyandu dan pendidikan masyarakat
  - 3) Menyelenggarakan inventarisasi penduduk yang tuna karya, tuna wisma, tuna susila, para penyandang cacat fisik, yatim piatu, jompo, panti asuhan dan pencatatan dalam rangka memasyarakatkan kembali bekas naripadana.
  - 4) Memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang keajahteraan masyarakat (raskin, BLSM, dsb)
  - 5) Membantu penyaluran bantuan terhadap korban bencana
  - 6) Membantu dan membina kegiatan pengumpulan zakat, infak, sedekah dan soial lainnya
  - 7) Membantu administrasi dibidang nikah, talak, cerai, rujuk, kelahiran serta pengurusan jenazah/kematian.
  - 8) Melaksanakan administrasi desa

- 9) Melaksanakan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat dibidangnya
- 10) Membantu tugas-tugas dibidang pemungutan pendapatan desa dan pemerintah di atasnya (pajak, retribusi dan pendapatan lainnya)
- 11) Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan sekretaris desa

i) Tugas Kepala Kampung:

Kepala Kampung mempunyai tugas membantu kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjalankan tugas, kepala kampung mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya
- 2) Membantu Kepala Desa dalam kegiatan penyuluhan, pembinaan dan kerukunan warga di wilayah kerjanya
- 3) Melaksanakan keputusan dari kebijaksanaan kepala desa di wilayah kerjanya
- 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

j) Tugas Pokok Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

Tugas Pengelola Kegiatan (TPK) berasal dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa yang secara umum mempunyai fungsi dan peran untuk mengelola dan melaksanakan pembangunan di desa, TPK terdiri dari ketua sebagai penanggung jawab operasional kegiatan di desa, mengkoordinasikan

pelaksanaan kegiatan di lapangan dan pengelolaan administrasi serta keuangan program.

Sekretaris dan bendahara membantu ketua TPK terutama dalam masalah administrasi dan keuangan jika memang diperlukan. TPK dapat menambah tenaga atau anggota sesuai bidang kegiatan yang diperlukan. Tambahan anggota atau tenaga dapat dipilih pada saat musyawarah desa dari informasi hasil musyawarah antar desa penempatan usulan.

Tugas dan tanggung jawab TPK:

- 1) Mengelola dan melaksanakan kegiatan yang didanai oleh Dana Desa secara terbuka dan melibatkan masyarakat dalam hal pembuatan rencana kerja detail dan rencana pembangunan dana untuk memanfaatkan biaya pelaksanaan
- 2) Penyiapan dokumen administrasi sesuai ketentuan pada buku PTO dan penjelasannya
- 3) Pembuatan rencana dan pelaksanaan proses pengadaan bahan dan alat, mengkoordinasikan tenaga kerja, pembayaran insentif dan bahan sesuai ketentuan
- 4) Memastikan bahwa tenaga kerja berasal dari masyarakat desa yang diutamakan
- 5) Pemeriksaan hasil kerja dan penerimaan bahan kemudian mengajukan sertifikat untuk mendapat persetujuan dari kepala desa
- 6) Pengawasan dan pengendalian kualitas pekerjaan
- 7) Pembuatan laporan bulanan



- 8) Menyelenggarakan dan melaporkan pertanggung jawaban seluruh penggunaan Dana Desa dan hasil akhir pelaksanaan kegiatan Dana Desa Perdesaan melalui pertemuan musyawarah desa
- 9) Membuat dan menandatangani surat pernyataan penyelesaian pelaksanaan kegiatan (SP3K) bersama PJOK
- 10) Membuat rencana operasional dan pemeliharaan asset hasil kegiatan Dana Desa
- 11) Menyelenggarakan yang diperlukan termasuk musyawarah dalam rangka perubahan kegiatan jika terjadi perubahan pekerjaan
- 12) Menyelenggarakan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban Dana Desa dan kemajuan pelaksanaan kegiatan setiap tahap pencairan dana melalui pertemuan musyawarah desa dan menempelkan data di papan informasi.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penyajian Data**

Bab ini menguraikan tentang data yang telah didapat dari hasil penelitian di lapangan atau yang dikenal dengan pendekatan kualitatif, yaitu data yang diperoleh dengan cara tanya jawab dengan narasumber sehingga memberikan gambaran yang jelas dan kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan melalui wawancara secara langsung di Desa Panompuan Jae serta beberapa narasumber data yang berupa dokumen, arsip dan referensi lainnya yang diperoleh di Desa Panompuan Jae terkait dengan Efektivitas Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Panompuan Jae Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut.

#### **1. Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin**

Berdasarkan jenis kelamin, narasumber dibagi menjadi dua kelompok yaitu narasumber dengan jenis kelamin laki-laki dan narasumber dengan jenis kelamin perempuan. Pada tabel 3.7 berikut dijelaskan persentase untuk masing-masing narasumber:

**Tabel 4.1****Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi
1.	Laki-laki	5 Orang
2.	Perempuan	–
Jumlah		5 Orang

Sumber: Kantor Kepala Desa Panompuan Jae

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa narasumber berasal dari jenis kelamin laki-laki sebanyak 5 orang.

**2. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan**

Berdasarkan dari tingkat pendidikan, narasumber dikelompokkan menjadi dua klasifikasi di dalam dunia pendidikan yaitu, tingkat SMP dan tingkat SMA. Pada tabel 3.8 berikut disajikan untuk masing-masing dari kategori tersebut:

**Tabel 4.2****Narasumber Berdasarkan Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Frekuensi
1.	SMP	2 Orang
2.	SMA	3 Orang
Jumlah		5 Orang

Sumber: Kantor Kepala Desa Panompuan Jae

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber yang memiliki tingkat pendidikan SMP sebanyak 2 orang dan Pendidikan tingkat SMA sebanyak 3 orang.

### 3. Distribusi Narasumber Berdasarkan Jabatan/Pekerjaan

Berdasarkan yang dilihat dari tingkat jabatan atau pekerjaan, narasumber dikelompokkan menjadi lima kategori yaitu Kepala Desa, Bendahara Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat.

**Tabel 4.3**

#### **Narasumber Berdasarkan Jabatan atau Pekerjaan**

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi
1.	Kepala Desa	1 Orang
2.	Bendahara	1 Orang
3.	Ketua BPD	1 Orang
4.	Ketua LKMD	1 Orang
5.	Tokoh Masyarakat	1 Orang
Jumlah		5 Orang

Sumber: Kantor Kepala Desa Panompuan Jae

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dalam wawancara kepada narasumber yang memiliki pekerjaan sebagai Kepala Desa 1 orang, Bendahara 1 orang, Ketua BPD 1 orang, Ketua LKMD 1 orang dan Tokoh Masyarakat 1 orang.

## **B. Hasil Penelitian**

Setelah dilakukan penelitian di lapangan, maka diperoleh berbagai data mengenai pendapatan responden. Dalam bab ini akan dibahas data yang diperoleh selama penelitian yang berlangsung di Desa Panompuan Jae Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. Pada kesempatan ini penulis berusaha untuk mengulas objek yang diteliti dan menganalisa data-data yang diperoleh. Sebelum menganalisa data tersebut terlebih dahulu mengklasifikasikan data tersebut menurut alternatif jawaban yang dipilih

### **1. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

#### **a. Mekanisme Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Mekanisme pengelolaan adalah suatu cara untuk melakukan tindakan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama Bapak Samsul Ma'rif Hasibuan selaku Kepala Desa di Desa Panompuan Jae pada tanggal 2 februari 2017 mengatakan bahwa dalam mekanisme pengelolaan alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Panompuan Jae sudah cukup baik dan terlaksana sesuai dengan yang direncanakan, apalagi dengan adanya anggota pendamping desa yang siap membantu proses jalannya pembangunan.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa juga diawasi dari berbagai unsur-unsur sehingga setiap kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dapat segera diatasi, akan tetapi sebagian besar masyarakat kurang adanya rasa memiliki sehingga kadang bisa memperlambat kinerja.

Dengan demikian dapat terlihat bahwa pelaksanaan yang dilakukan Pemerintahan Desa sudah berjalan dengan baik.

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Jul sahril Hasibuan selaku Bendahara Desa pada saat wawancara pada tanggal 2 februari 2017, bahwasanya dalam pengelolaan alokasi Dana Desa, strategi yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa sudah terlaksana dengan baik apalagi adanya kerja sama dengan pendamping desa. Dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa juga selalu diawasi oleh lembaga-lembaga terkait seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Jadi berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Jul sahril Hasibuan, terlihat bahwa mekanisme ini tidak terlepas dari kerjasama yang baik diantara perangkat desa.

Hal tersebut didukung oleh Bapak Ridwan Simamora selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada saat wawancara tanggal 2 februari 2017 , mengatakan bahwa mekanisme yang dilakukan sudah cukup baik apalagi dengan melibatkan pihak-pihak terkait untuk mengawasi agar tidak ada kesalahpahaman, karena dalam mekanisme ini harus dilaksanakan secara terbuka supaya ada rasa kepercayaan demi terjalinnya kerjasama yang baik dan partisipasi masyarakat lambat laun akan tumbuh juga.

Berdasarkan penyampaian dari Bapak Ridwan Simamora tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasanya pelaksanaan yang baik tidak cukup hanya perangkat desa saja, harus ada kerjasama dari pihak-pihak terkait demi kepentingan bersama.

Kemudian diperkuat lagi dari hasil wawancara pada tanggal 2 februari 2017 bersama Bapak Ali Gebri selaku Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat(LKMD), mengatakan bahwa Pemerintahan Desa yang menjalankan mekanisme pengelolaan sudah melaksanakannya dengan baik, dengan melihat hasil pembangunan di desa ini sudah cukup memuaskan. Itu membuktikan bahwa perangkat desa dan pihak-pihak terkait lainnya sudah bekerja keras demi mencapai tujuannya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa kerjasama itu sangatlah penting dalam mencapai tujuan.

Pendapat serupa juga dikatakan oleh Bapak Irsan Hasibuan selaku tokoh pada saat wawancara pada tanggal 2 februari 2017 masyarakat, mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa sudah cukup baik dan mudah-mudahan untuk pembangunan selanjutnya bisa berjalan dengan lancar.

Berdasarkan uraian yang dikatakan oleh Bapak Irsan Hasibuan, Pemerintahan Desa sudah melaksanakan mekanisme pengelolaan alokasi Dana Desa dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari beberapa uraian hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme pelaksanaan pengelolaan alokasi Dana Desa yang dilaksanakan

oleh Pemerintahan Desa di Desa Panompuan Jae sudah jelas dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang sudah diatur apalagi dengan adanya kerja sama yang baik dilingkungan Desa Panompuan Jae baik dari pemerintahan Desa, Lembaga terkait dan masyarakat sehingga pengelolaan yang dilaksanakan berjalan dengan baik dan terlaksana pembangunan secara terus menerus.

#### **b. Pencapaian Tujuan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Tujuan dialokasikannya Dana Desa adalah untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembinaan Masyarakat Desa.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 2 februari 2017 dengan Bapak Samsul Ma'rif Hasibuan selaku Kepala Desa mengenai pencapaian tujuan pelaksanaan pengelolaan alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan, terjadinya pembangunan di desa Panompuan Jae adalah hasil dari Dana Desa yang ada, oleh karena itu sampai sekarang terus ada pembangunan dan tujuan dari pelaksanaan Dana Desa sudah tercapai dan sangat membantu pembangunan desa.

Hasil wawancara dari uraian di atas bisa dilihat bahwa tujuan dari Dana Desa adalah dapat membantu desa dalam melaksanakan pembangunan.

Kemudian hasil wawancara pada tanggal 2 februari 2017 dengan Bapak Jul Sahril Hasibuan selaku Bendahara Desa, pencapaian tujuan dari pelaksanaan pengelolaan alokasi Dana Desa tentunya sangat banyak dan dari beberapa tujuan itu sudah banyak yang terpenuhi, dengan adanya Dana Desa ini akan sangat membantu dalam perbaikan-perbaikan sarana dan prasarana desa dan pemberdayaan masyarakatnya juga.



Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bisa dikatakan bahwasanya tujuan tentang pengelolaan Dana Desa ini dalam meningkatkan pembangunan sudah tercapai karena pengelolaan sudah tepat sasaran.

Pendapat serupa dikemukakan oleh Bapak Ridwan Simamora selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada saat wawancara pada tanggal 2 februari 2017, Pembangunan yang dilaksanakan tentu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, jadi dengan Dana Desa ini pembangunan meningkat dan Pemerintahan Desa juga melakukan tugasnya dengan baik.

Dari hasil wawancara di atas, bias dilihat bahwa tujuan dari Dana Desa adalah dapat membantu desa dalam melaksanakan pembangunan.

Pendapat yang sama juga keluar dari perkataan Bapak Ali Gebri selaku Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat (LKMD) pada saat wawancara pada tanggal 2 februari 2017, pencapaian tujuan dari Dana Desa ini sudah mencapai tujuan karena bisa membantu pemerintahan desa dalam melaksanakan pembangunan dan bisa menjadikan kerja sama yang baik diantara pihak-pihak terkait sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Hasil dari uraian diatas bisa dilihat bahwa lembaga-lembaga terkait bisa menjalankan fungsinya masing-masing dengan baik dan terjalin kerja sama dilingkaran Pemerintahan dan masyarakat Desa Panompuan Jae.

Senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Irsan Hasibuan selaku tokoh masyarakat pada saat wawancara tanggal 2 februari 2017, dengan adanya Dana Desa, desa Panompuan Jae bisa melakukan pembangunan dan tujuan dari

Pemerintahan Desa untuk meningkatkan pembangunan tercapai dan terjalin kerja sama yang baik diantara Pemerintahan Desa.

Berdasarkan dari semua hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pencapaian tujuan dari pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan sudah tercapai dengan baik dan menjadikan kerja sama yang baik dilingkaran desa tersebut.

### **c. Transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 2 februari 2017 bersama Bapak Samsul M'rif Hasibuan selaku Kepala Desa, mengatakan bahwa transparansi mengenai Pengelolaan Dana Desa itu dilakukan secara terbuka, jadi dengan adanya transparansi bisa juga menimbulkan tingkat kepercayaan dari masyarakat apalagi dilakukan secara terbuka supaya bisa diketahui kemana saja dana itu dialokasikan ditambah dengan banyaknya pihak-pihak yang mengawasi tentang pengelolaan ini, akan tetapi keinginan tahanan masyarakat mengenai pembangunan masih sangat kurang.

Berdasarkan uraian di atas, bisa dilihat bahwasanya soal transparansi dana adalah hal yang sangat utama karena ini akan menjadi masalah kalau tidak ada transparansi soal dana.

Pendapat serupa juga dikatakan oleh Bapak Jul Sahril Hasibuan selaku Bendahara Desa pada saat wawancara tanggal 2 februari 2017, soal transparansi di desa ini pasti ada karena ini adalah salah satu faktor untuk menumbuhkan tingkat kepercayaan dari masyarakat desa dan meningkatkan kerja sama diantara perangkat desa juga. Tetapi masalahnya masyarakat desa kurang ingin tahu

masalah transparansi, masyarakat hanya peduli dengan hasil pembangunan yang sudah dilaksanakan.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa, transparansi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kerja sama yang baik diantara perangkat desa. Akan tetapi dalam hal ini, partisipasi masyarakat perlu ditumbuhkan lagi supaya mereka tahu apa itu transparansi.

Kemudian hasil wawancara pada tanggal 2 februari 2017 dengan Bapak Ridwan Simamora selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) , transparansi mengenai Dana Desa ini, pemerintah desa melakukannya secara terbuka kepada masyarakat karena ini merupakan salah satu faktor pendukung untuk kemajuan kinerja pemerintah kedepannya.

Berdasarkan dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa berbicara mengenai Dana Desa menjadi tolak ukur untuk memperlancar atau tidaknya roda pemerintahan.

Pendapat serupa juga dikatakan pada saat wawancara pada tanggal 2 februari 2017 oleh Bapak Ali Gebri selaku ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), transparansi di desa ini pasti ada dilakukan dengan cara adanya pertanggung jawaban kemana saja Dana Desa itu dialokasikan, karena kalau tidak nanti bisa menimbulkan rasa curiga diantara masyarakat desa terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwasanya berbicara soal Dana Desa adalah hal yang sensitif karena bisa menimbulkan masalah sosial dikalangan masyarakat desa dengan pemerintahan desa.

Kemudian hasil wawancara pada tanggal 2 februari 2017 dengan Bapak Irsan Hasibuan selaku tokoh masyarakat, mengatakan bahwa , selaku tokoh masyarakat desa pasti ingin mengetahui kemana saja alokasinya dan ternyata tanpa diminta pun pemerintah desa mengadakan pemaparan laporan soal transparansi dari alokasi Dana Desa ini, dan itu bisa menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa dan lembaga-lembaga terkait. Akan tetapi masih banyak masyarakat di desa ini yang tidak mau tahu masalah transparansi karena mereka hanya mementingkan hasil dari pembangunannya.

Berdasarkan dari semua hasil wawancara di atas mengenai transparansi pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan pemerintahan desa Panompuan Jae bisa disimpulkan bahwa berbicara mengenai transparansi Dana Desa adalah hal yang utama karena kalau tidak ada transparansi dari pemerintahan desa, maka bisa menimbulkan masalah sosial dan berefek kepada kinerja pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan lagi supaya pencapaian tujuannya lebih maksimal.

## **2. Peningkatan Pembangunan**

### **a. Pembangunan Sarana Fisik**

Pembangunan fisik yang dimaksud adalah pembangunan sarana dan prasarana yang di lakukan di Desa Panompuan Jae Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan, setiap kegiatan atau rentetan dari usaha proses pembangunan harus dikembangkan untuk meningkatkan nilai-nilai dan objek yang dilaksanakan agar dapat berubah kearah yang lebih baik sesuai dengan tujuan yang dikehendaki.

Setelah dilakukan wawancara kepada Bapak Samsul Ma'rif Hasibuan selaku Kepala Desa pada tanggal 3 februari 2017, beliau mengatakan bahwa Pembangunan yang dilakukan di Desa Panompuan Jae dananya berasal dari Dana Desa, tujuan utama pembangunan yang dilakukan itu seperti pembangunan fisik contoh: pembangunan jalan rabat beton, irigasi, jalan usaha tani, perpustakaan desa, dan masih banyak sekali, yang jelas pembangunan ini dilakukan untuk kepentingan masyarakat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, pembangunan sarana fisik merupakan kebutuhan dari masyarakat sehingga penggunaan Dana Desa lebih besar diperuntukkan bagi pembangunan sarana fisik.

Kemudian dilakukan wawancara pada tanggal 2 februari 2017 dengan Bapak Jul Sahril Hasibuan selaku Bendahara Desa, dengan adanya Dana Desa ini maka sarana dan prasarana di Desa ini lebih banyak yang dapat dibangun sehingga kegunaannya memang benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang menggunakannya. Seluruh pemerintahan desa bekerja sama dengan pendamping desa untuk menghasilkan pembangunan yang tepat guna karena semua masyarakat memang sama-sama membutuhkannya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam setiap kegiatan pembangunan yang di adakan oleh desa, dibutuhkan kerja sama tim yang baik demi tercapainya tujuan yang terbaik pula.

Kemudian Bapak Ridwan Simamora sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa pada saat wawancara tanggal 3 februari 2017 mengatakan pendapatnya tentang pembangunan fisik desa , dalam pelaksanaan

pembangunan sarana fisik desa, Pemerintahan Desa sekaligus masyarakat desa merasakan keuntungan yang sangat besar dari pembangunan ini, karena banyak manfaat yang dirasakan terutama dalam hal perekonomian, contohnya disaat panen di sawah. Dengan jalan yang bagus akan memudahkan masyarakat untuk membawa hasil panen dari sawah menuju tempat penjualan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwasanya keuntungan yang dirasakan masyarakat dalam pembangunan fisik sangat banyak terutama pembangunan jalan karena akan memudahkan dalam akses transportasi.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Ali Gebri selaku Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) pada saat wawancara tanggal 3 februari 2017, beliau mengatakan bahwa penggunaan Dana Desa dalam hal pembangunan sarana fisik memang banyak sekali manfaat yang dirasakan oleh Pemerintahan Desa dan juga masyarakatnya, tapi yang sangat disayangkan adalah partisipasi masyarakat masih kurang dalam proses pembangunannya, masyarakat hanya mau menikmati pembangunan yang sudah selesai dan mereka tidak mau ikut serta dalam proses pembangunannya, semua pekerjaan diserahkan kepada pihak ketiga meskipun sebenarnya masyarakat mampu mengerjakannya.

Dalam uraian di atas dapat disimpulkan bahwasanya, partisipasi masyarakat itu sangatlah penting karena yang merasakan akibat baik dan buruk dari pembangunan itu adalah masyarakatnya sendiri.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Irsan Hasibuan selaku tokoh masyarakat pada saat wawancara tanggal 3 februari 2017, beliau mengatakan bahwa , pembangunan sarana fisik merupakan kebutuhan masyarakat sehingga

masyarakat sangat senang dengan adanya pembangunan tersebut. Hal ini juga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Untuk mendukung perencanaan dan proses pembangunan di Desa Panompuan Jae, terdapat berbagai potensi sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel 4.4**  
**Daftar Potensi Desa Panompuan Jae**

No.	Bidang	Potensi
A.	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya gedung sekolah PAUD dan TK</li> <li>2. Adanya gedung Sekolah Dasar (SD)</li> <li>3. Adanya gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP)</li> </ol>
B.	Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya poli klinik Desa (POLINDES)</li> <li>2. Adanya gedung Posyandu</li> <li>3. Adanya Bidan Desa</li> </ol>
C.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya sungai yang memiliki batu untuk pekerjaan bangunan</li> <li>2. Adanya jalan usaha tani</li> <li>3. Adanya jembatan</li> <li>4. Adanya sarana irigasi</li> <li>5. Toko bangunan relatif dekat</li> <li>6. Adanya tenaga bangunan yang terampil dan kesadaran gotong royong cukup baik</li> </ol>
D.	Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya bibit tanaman untuk penghijauan lingkungan desa</li> </ol>
E.	Sosial Budaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya masjid dan mushollah</li> <li>2. Adanya lapangan bola volley, badminton dan sepak bola</li> </ol>

		3. Adanya kelompok rebana
F.	Koperasi dan usaha masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya kelompok tani</li> <li>2. Adanya buruh tani</li> <li>3. Adanya penggilingan padi</li> <li>4. Adanya usaha warung manisan</li> <li>5. Adanya usaha ikan dan pakan ikan</li> <li>6. Adanya masyarakat yang memelihara hewan ternak</li> </ol>

Sumber: Kantor Kepala Desa Panompuan Jae

Berdasarkan pengkajian desa, masalah yang terdapat di Desa Panompuan Jae tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel 4.5**

**Daftar Potensi Masalah di Desa Panompuan Jae**

No.	Bidang	Masalah
A.	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya ruang belajar di SD</li> <li>2. Kurangnya penguasaan aplikasi computer bagi murid SMP</li> <li>3. Ruang belajar gedung TK kurang memadai</li> </ol>
B.	Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya masyarakat yang tidak memiliki MCK</li> <li>2. Sulit memperoleh air bersih pada musim kemarau</li> <li>3. Program BPJS kesehatan belum merata di Masyarakat</li> </ol>
C.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jalan usaha sulit dilalui pada waktu hujan</li> <li>2. Adanya pemukiman yang tidak</li> </ol>



		tersentuh jaringan listrik 3. Bundungan untuk suplay air ke kolam masih non teknis
D.	Lingkungan Hidup	1. Adanya masyarakat yang membuang sampah ke saluran irigasi masjid 2. Adanya genangan air di tepid an
E.	Sosial Budaya	1. Terkadang terjadi tindakan kejahatan pencurian 2. Generasi muda kurang partisipasi dalam musyawarah desa 3. Masih ada RTM belum mendapat santunan
F.	Koperasi dan Usaha Masyarakat	1. Para petanikurang mengetahui tentang ilmu pertanian 2. Belum dikembangkannya usaha peternakan itik 3. Belum dikembangkannya usaha pengelolaan hasil perikanan dan peternakan oleh masyarakat 4. Kurangnya kelompok usaha perempuan
G.	Pemerintahan	1. Kinerja perangkat desa dan BPD belum memadai 2. Administrasi desa belum tertata dengan baik 3. Kurangnya penguasaan tekhnologi informasi dan aplikasi computer oleh perangkat desa 4. Adanya masyarakat yang belum

		memiliki kartu keluarga 5. Adanya masyarakat yang belum memiliki E-KTP
H.	Pemerintahan	1. Pupuk bersubsidi sulit diperoleh 2. Harga hasil pertanian yang rendah 3. Harga karet dan sawit rendah 4. Kurangnya saluran irigasi 5. Akses jalan persawahan dan kebun yang sulit

Sumber: Kantor Kepala Desa Panompuan Jae

Dari semua uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, pembangunan sarana fisik desa ini merupakan suatu kebutuhan masyarakat karena banyak sekali manfaatnya, seperti memudahkan akses transportasi dan juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakatnya.

#### **b. Pemberdayaan Masyarakat**

Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing.

Setelah dilakukan wawancara pada tanggal 3 februari 2017 dengan Bapak Samsul Ma'rif Hasibuan, beliau mengatakan Bahwa, Pemberdayaan masyarakat desa memang sangatlah penting, karena dalam pemberdayaan ini akan memberi pelajaran yang baru bagi masyarakat. Dalam pengelolaan Dana Desa,

pemerintahan desa melakukan pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan seperti pelatihan perangkat desa supaya perangkat desa lebih mengerti apa tugas dan tujuannya, ada juga pelatihan untuk masyarakat seperti pelatihan menjahit, pelatihan pembuatan bibit, pelatihan pembuatan pupuk kompos dan masih banyak lagi. Pada awal pelatihan banyak masyarakat berpartisipasi tapi lama-kelamaan hanya sedikit yang mau ikut melakukan kegiatan pemberdayaan ini.

Dalam uraian di atas dapat disimpulkan bahwasanya banyak kegiatan pemberdayaan yang dilakukan tetapi antusias masyarakatnya masih kurang untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Hal yang sama juga diungkapkan pada saat wawancara tanggal 3 februari 2017 oleh Bapak Jul Sahril Hasibuan selaku Bendahara Desa, beliau mengatakan, sudah banyak kegiatan pemberdayaan yang disediakan oleh pemerintah desa tetapi hanya sedikit masyarakat yang mau mengikuti kegiatan tersebut. Banyak alasan yang sering didengar seperti, mereka sibuk bekerja dikebun/sawah, tidak terlalu mengerti dengan materi yang disampaikan pada saat kegiatan berlangsung dan ada juga yang mengatakan bahwa dia tidak mengetahui adanya kegiatan pemberdayaan tersebut.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwasanya partisipasi masyarakat masih kurang dan pemahaman yang diberikan atau informasi yang diberikan pemerintah desa masih kurang jelas sehingga masyarakat kurang memahami apa itu pemberdayaan masyarakat desa.

Kemudian Bapak Ridwan Simamora sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengatakan pendapatnya pada saat wawancara

tanggal 3 februari 2017, banyak masyarakat yang merasakan keuntungan setelah mengikuti kegiatan pemberdayaan itu karena mereka berfikir bahwa itu sangat penting untuk menunjang kebutuhan hidupnya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, jika masyarakat mau mengikuti kegiatan pemberdayaan ini maka secara langsung mereka akan merasakan keuntungannya.

Kemudian Bapak Ali Gebri selaku Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, mengatakan pada saat wawancara tanggal 3 februari 2017 bahwa Dana Desa yang telah dicairkan juga dipergunakan untuk pemberdayaan Masyarakat desa guna menjadikan masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Pemerintahan desa bersama pendamping desa berupaya memberikan kegiatan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dan tentunya memberi manfaat untuk masyarakatnya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat dan juga pendamping desa bekerja sama untuk memberikan kegiatan pemberdayaan yang terbaik untuk masyarakatnya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Irsan Hasibuan selaku tokoh masyarakat desa pada saat wawancara tanggal 3 februari 2017, beliau mengatakan bahwa Pemerintahan desa selalu berusaha untuk mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat akan tetapi masyarakat kurang berpartisipasi dalam kegiatan ini karena banyak masyarakat kurang memahami apa itu pemberdayaan jadi sebaiknya pemerintahan desa menjelaskan terlebih dahulu apa itu pemberdayaan dan apa kegunaannya.

Dari semua uraian di atas dapat disimpulkan bahwasanya, pemberdayaan masyarakat ini memanglah penting dan pemerintahan desa juga pendamping desa sudah berusaha memberikan kegiatan yang berguna akan tetapi masyarakat kurang berpartisipasi karena kurangnya pengetahuan tentang pemberdayaan tersebut jadi sebaiknya dilakukan dulu musyawarah antar pemerintahan desa dengan masyarakat kemudian baru diadakan pemberdayaan tersebut.

### **c. Pembinaan Masyarakat**

Pembinaan adalah suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang sudah di miliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum di miliki, dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya, untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang dijalani lebih efektif.

Setelah dilakukan wawancara pada tanggal 3 februari 2017 dengan Bapak Samsul Ma'rif Hasibuan selaku Kepala Desa, beliau mengatakan bahwa dalam Pembinaan masyarakat lebih banyak diperuntukkan bagi kebutuhan bersama masyarakat, seperti contohnya pengadaan buku-buku agama, rehab masjid, pengadaan genset desa, pengadaan taratak desa, pengadaan alat-alat pemakaman desa, pengadaan ala-alat pesta desa dan masih banyak lagi. Dengan adanya kebutuhan bersama ini akan sangat membantu kebutuhan masyarakat tanpa harus membeli kebutuhan sendiri.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, pengadaan barang-barang kebutuhan masyarakat menjadi tujuan utama dari kegiatan pembinaan ini karena memberikan apa yang masyarakat butuhkan.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Jul Sahril Hasibuan selaku Bendahara Desa pada saat wawancara tanggal 3 februari 2017, dengan adanya Dana Desa ini maka pengadaan kebutuhan bersama masyarakat akan semakin mudah terpenuhi, karena kalau untuk membeli sendiri kebutuhan-kebutuhan tersebut akan memakan biaya yang cukup banyak jadi ini akan sangat meringankan beban masyarakatnya.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, dengan adanya barang-barang tersebut akan sangat berguna untuk masyarakatnya.

Hal ini juga dikatakan oleh Bapak Ridwan Simamora selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa pada saat wawancara tanggal 3 februari 2017, dalam kegiatan pembinaan masyarakat lebih banyak digunakan untuk kebutuhan bersama, selain pengadaan barang-barang yang bisa digunakan, ada juga organisasi naposo nauli bulung atau sering disebut organisasi remaja. Dengan adanya organisasi ini akan sangat membantu setiap kegiatan atau acara yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, para pemuda-pemudi di desa tersebut berusaha untuk menjadi organisasi yang berguna untuk masyarakatnya dan siap membantu setiap permasalahan di desanya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Ali Gebri selaku Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) pada saat wawancara tanggal 3 februari 2017, Organisasi pemuda-pemudi ini jelas membawa pengaruh yang positif bagi kesejahteraan masyarakat desa karena antusias dan partisipasi mereka sangatlah dibutuhkan dalam kemajuan sebuah desa.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan organisasi pemuda-pemudi ini diterima baik oleh masyarakat desa.

Kemudian Bapak Irsan Hasibuan juga mengatakan pada saat wawancara tanggal 3 februari 2017 bahwa Dana Desa yang diperuntukkan bagi pembinaan masyarakat kemudian dibelanjakan untuk pengadaan kebutuhan bersama jelas sangat-sangat baik sekali. masyarakatnya merasa sangat beruntung dapat menggunakan pengadaan barang-barang tersebut dan apalagi ditambah dengan adanya organisasi pemuda-pemudi yang siap membantu setiap acara yang diadakan.

Dari semua uraian hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya, penggunaan Dana Desa untuk pembinaan masyarakat lebih kepada pengadaan barang-barang kebutuhan bersama masyarakat dan juga untuk membina organisasi pemuda-pemudinya agar dapat bermanfaat dan dapat membawa kemajuan untuk masyarakat dan desanya.

### **C. Pembahasan**

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No.7 Tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Permendagri tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Dengan demikian desa dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Disamping itu diharapkan dapat diwujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, dan memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.

Oleh karena itu, proses dan mekanisme penyusunan APBDes yang diatur dalam Permendagri tersebut akan menjelaskan siapa dan kepada siapa bertanggung jawab dan bagaimana cara mempertanggungjawabkannya. Untuk itu perlu ditetapkan pedoman umum tata cara pelaporan dan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan desa, yang dimuat dalam Peraturan Menteri dalam Negeri NO. 35 Tahun 2007.

Untuk memberikan pedoman bagi pemerintahan desa dalam menyusun RPJM-Desa dan RKP-Desa perlu dilakukan pengaturan. Dengan itu maka dikeluarkan Peraturan Menteri Negeri NO. 66 Tahun 2007 tentang perencanaan desa. Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar proses penyusunan APBDesa semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penerapan lokasi, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Pembangunan dengan melibatkan langsung masyarakat menunjukkan hasil lebih baik dengan efisiensi daripada pembangunan desa yang selama ini dijalankan dengan mekanisme proyek. Memberikan kesempatan luas kepada desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan memberikan kewenangan disertai dengan biaya kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Panompuan Jae Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan sudah berjalan dengan efektif, hal tersebut ditandai dengan sudah terlaksananya pelaksanaan mekanisme penyaluran Dana Desa sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat dan sudah dilaksanakan



sesuai Undang-undang yang berlaku. Bekerjanya lembaga desa dengan baik yang selalu mengedepankan keterbukaan menjadi salah satu faktor pendukung keefektivan pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa ini. Pembangunan desa Panompuan Jae juga telah dilaksanakan sesuai dengan keinginan masyarakat dan sesuai kebutuhan yang diprioritaskan.

Pengelolaan kas Desa Panompuan Jae juga sudah berjalan dengan baik dengan didukungnya proses transparansi yang dilakukan oleh pihak pemerintahan umum dan selalu melibatkan masyarakat dalam hal keterbukaan ini yang mana hal ini dimaksud untuk meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat desa kepada pihak pemerintahan desa, hal ini juga menjadi salah satu strategi yang dilakukan oleh pihak pemerintahan desa Panompuan jae untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa.

Dan ada juga sebagian masyarakat Desa Panompuan Jae yang tidak mau berpartisipasi dalam proses pelaksanaan pembangunan dikarenakan Sumber Daya Manusia masyarakat di Desa Panompuan Jae kurang mampu, hal tersebut disebabkan oleh tingkat pendidikan sebagian kecil masyarakat yang rendah sehingga masyarakat sulit untuk memahami dan mengartikan akan suatu proses pembangunan itu dan pembangunan akan sulit berjalan tanpa adanya partisipasi yang tinggi dari masyarakat itu sendiri. Tapi hal tersebut tidak mempengaruhi keefektivan pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Panompuan Jae karena sebagian besar masyarakat sudah mulai tergerak hatinya untuk diajak bekerja sama dalam proses pembangunan, hal ini didorong dengan rutusnya sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak pemerintahan desa.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitiandan pembahasan, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Panompuan Jae sudah cukup baik, semua proses sudah dilaksanakan dengan prosedurnya. Meskipun dalam proses pencairan dana desa pernah mengalami keterlambatan dikarenakan pemerintahan desa yang kurang sigap dalam mempersiapkan syarat untuk pencairan dana desa tersebut sehingga sedikit memperlambat jalannya proses pembangunan.
2. Peran pemerintah sebagai fasilitator dan pelaksana dari pengelolaan Alokasi Dana Desa bersama pendamping desa dan lembaga-lembaga terkait sudah bisa bekerja sama dengan baik untuk mewujudkan pembangunan yang tepat guna dan dapat mensejahterakan masyarakatnya.
3. Tujuan dari pembangunan yang dilakukan adalah untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat baik secara fisik maupun non-fisik sesuai dengan yang sudah disepakati oleh desa tersebut dan sesuai kebutuhan.
4. Efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah efektif, terbukti dengan diadakannya laporan pertanggungjawaban secara terbuka kepada masyarakat desa dan disalurkan Dana Desa dengan tepat sasaran sesuai kebutuhan yang ada.

5. Transparansi soal Dana Desa yang dilakukan pemerintahan desa sudah dilaksanakan supaya pandangan-pandangan negatif masyarakat terhadap pemerintahan desa tidak ada.

## **B. Saran**

Sehubungan dengan hasil temuan di atas, maka yang menjadi saran dalam peneliatian adalah:

1. Diharapkan pemerintahan desa dapat mengkaji ulang soal keterlambatan dana yang masuk ke desa dari kabupaten karena jika terjadi seperti itu kembali maka pembangunan untuk kedepannya akan selalu terlambat dan bisa menimbulkan konflik diantara pemerintahan desa dengan masyarakat desa.
2. Hubungan baik dan kerjasama antara pemerintahan desa, pendamping desa , lembaga-lembaga terkait dan juga masyarakat agar dipertahankan kinerja sehingga ke depannya dapat lebih baik lagi dan hasil yang didapat juga lebih maksimal.
3. Diharapkan kepada masyarakat yang kurang berpartisipasi supaya lebih meningkatkan partisipasinya lagi sehingga pembangunan cepat terealisasikan secara efektif dan efisien.
4. Diharapkan proses-proses yang kurang optimal dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan dapat lebih ditingkatkan lagi keoptimalannya untuk ke depannya.

5. Diharapkan transparansi yang dilakukan secara terbuka kepada masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa lebih ditingkatkan lagi agar tidak terjadi kesalahan pemahaman antara pemerintahan desa dan masyarakat untuk ke depannya.

## Daftar Pustaka

- Abdurahmat, 2008. *Efektivitas Organisasi Edisi Pertama*. Jakarta: Airlangga
- Alwi, Hasan Dkk. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Anwas, Oos M. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Damsar, Indrayani. 2016. *Pengantar Sosiologi Perdesaan*. Jakarta: Kencana
- Effendi, Onong Uchjana, 1989. *Kamus Komunikasi*. Bandung: PT. Mandar Maju
- Haryono. 2002. *Auditing (pengauditan)*. Yogyakarta: Bentang Pustaka
- 2012. *Pengantar Studi Administrasi Pembangunan*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Julita, Jufrizen Dkk. 2014. *Penganggaran Perusahaan*. Bandung: Cipta pustaka Media
- Kuncoro, Mudrjat. 2014. *Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah Edisi Ketigs*. Jakarta: Erlangga
- Kriyantono, Rachmad. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana
- Muljono, Twguh Pudjo. 1996. *Bank Budgeting*. Yogyakarta: BPFE
- Nurcholis, Hanif Dkk. 2009. *Perencanaan Partisipatif Pembangunan Daerah*. Jakarta: Kompas Gramedia
- Siagian, Sondang P. 1988. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: CV. Haji Masagung
- 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia Menghadapi Abad Ke 21, Jilid 2, Edisi Keenam*. Jakarta: Erlangga
- 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Sugiono, 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif R&D)*. Bandung; Alfabeta
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama

----- 2010. *Sosiologi Pemerintahan dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Intraksi dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia

Streers, M Richard. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga

Widjaja. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia: dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Undang-undang:

Undang-undang R.I Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pemerintahan R.I Nomor 43 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **1. IDENTITAS**

Nama : Rizki Ananda Siagian  
Tempat/Tanggal Lahir : Desa Panompuan Tonga, 18 September  
1995  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Krakatau, Jalan Bukit Barisan 1 No 24  
Medan  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Anak Ke : 4 dari 4 bersaudara

### **2. NAMA ORANG TUA**

Ayah : Abdollah Siagian  
Ibu : Rosmawarni Harahap  
Alamat : Desa Panompuan Tonga Kecamatan  
Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan

### **3. PENDIDIKAN**

1. Tahun 2001-2007 : MIN Panompuan Tonga
2. Tahun 2007-2010 : MTSs Pondok Pesantren Nurul Falah  
Tamosu Panompuan Tonga
3. Tahun 2010-2013 : SMA N 6 Padang Sidempuan
4. Terdaftar sebagai mahasiswi IAN FISIP UMSU Tahun Akademik  
2013/2017

Demikianlah riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Medan, Maret 2017

Rizki Ananda Siagian

## **DAFTAR WAWANCARA**

### **PEMERINTAHAN DESA**

**Nama : Samsul Marif Hasibuan**

**Jabatan : Kepala Desa**

**Umur : 45 Tahun**

**Alamat : Desa Panompuan Jae**

#### **1. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

##### **A. Mekanisme Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

1. Bagaimana mekanisme penerimaan Alokasi Dana Desa dari pusat ke daerah dan apakah sudah sesuai dengan prosedur ?

Jawaban: mekanisme penerimaannya sejauh ini sudah sesuai dengan prosedur dan tidak ada hambatan dalam proses penerimaannya.

2. Apakah ada keterlambatan dari waktu yang telah ditentukan masuknya Alokasi Dana Desa ke Desa Panompuan Jae?

Jawaban: kalau keterlambatan waktu tidak ada, hanya saja kami dari pihak pemerintahan desa yang kurang sigap dalam pengurusan prosedur penerimaan Alokasi Dana Desa itu.

3. Apakah dalam proses pelaksanaan kegiatan pembangunan Alokasi Dana Desa banyak menemukan kendala-kendala?



Jawaban: iya kendala itu sudah pasti ada, tetapi kita Pemerintahan Desa selalu berusaha untuk menemukan jalan keluar untuk menyelesaikan kendala-kendala itu.

## **B. Pencapaian Tujuan**

1. Apa tujuan utama Pemerintahan Desa dan juga masyarakat desa dalam melaksanakan kegiatan Alokasi Dana Desa?

Jawaban: yang jelas tujuan utama kami itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Apakah hasil kegiatan pembangunan Alokasi Dana Desa sudah sesuai dengan target yang direncanakan?

Jawaban: hasilnya sudah sesuai dengan yang kami rencanakan sebelumnya.

3. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap hasil kerja pembangunan Alokasi Dana Desa?

Jawaban: masyarakat sangat senang dengan pembangunan ini, dan mereka juga berharap semoga pembangunannya dapat ditingkatkan lagi.

## **C. Transparansi dan Akuntabilitas**

1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa?

Jawaban: pengawasannya dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintahan Desa, Pendamping Desa dan juga Lembaga-lembaga terkait lainnya serta masyarakat desa juga.

2. Bagaimana upaya Pemerintahan Desa agar adanya transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa?

Jawaban: sejauh ini upaya kami itu adalah melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan, apa saja pengeluarannya dan itu dilaporkan pada saat Musrembang Desa.

3. Apakah pemerintahan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya pembangunan Alokasi Dana Desa?

Jawaban: tentu, karena masyarakat juga berhak tahu apa saja kegiatan pembangunannya.

## **2. Pelaksanaan Pembangunan**

### **A. Pembangunan sarana Fisik**

1. Apa saja pembangunan yang dilakukan dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa?

Jawaban: pembangunannya itu ada pembangunan jalan pertanian, jembatan, irigasi dan banyak lagi.

2. Apakah ada permasalahan dalam proses pembangunan di Desa Panompuan Jae ini?

Jawaban: masalah itu paling sering muncul karena cuaca buruk yang memperlambat pembangunan.

3. Apakah masyarakat aktif dalam memberikan ide dalam perencanaan pembangunan?

Jawaban: hanya sebagian kecil masyarakat yang mau berpartisipasi.

## **B. Pemberdayaan Masyarakat**

1. Apa saja jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Desa Panompuan Jae?

Jawaban: ada pelatihan perangkat desa, pelatihan keagamaan, pelatihan computer, pelatihan pembuatan bibit, pelatihan pembuatan pupuk kompos.

2. Apakah kegiatan pemberdayaan ini memberi pengaruh positif bagi masyarakat?

Jawaban: tentu, karena mereka bisa memperoleh banyak ilmu.

3. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kegiatan pemberdayaan ini?

Jawaban: sudah tentu mereka sangat senang.

## **C. Pembinaan Masyarakat**

1. Apa saja jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Panompuan Jae ini?

Jawaban: di pembinaan masyarakat kami tidak mengadakan kegiatan.

2. Jadi apa tujuan dari pembinaan ini jika tidak ada kegiatan?

Jawaban: di pembinaan ini kami mengadakan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dan barang-barang ini digunakan bersama.

3. Apa saja barang-barang yang disediakan untuk masyarakat itu?

Jawaban: pengadaan buku-buku agama, alat-alat pesta, lapangan bola, rehab masjid, pengadaan genset desa.

## **DAFTAR WAWANCARA**

### **PEMERINTAHAN DESA**

**Nama : Jul Sahril Hasibuan**

**Jabatan : Bendahara Desa**

**Umur : 44 Tahun**

**Alamat : Desa Panompuan Jae**

#### **1. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

##### **A. Mekanisme Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

1. Bagaimana mekanisme penerimaan Alokasi Dana Desa dari pusat ke daerah dan apakah sudah sesuai dengan prosedur ?

Jawaban: sudah cukup baik dan terlaksana dengan semestinya tentang pengelolaan yang akan dilakukan.

2. Apakah ada keterlambatan dari waktu yang telah ditentukan masuknya Alokasi Dana Desa ke Desa Panompuan Jae?

Jawaban: keterlambatan biasanya terjadi karena Pemerintahan desa yang kurang cepat dalam melengkapi syarat penerimaan Alokasi Dana Desa.

3. Apakah dalam proses pelaksanaan kegiatan pembangunan Alokasi Dana Desa banyak menemukan kendala-kendala?

Jawaban: kurangnya kerjasama antara masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pembangunan.

## **B. Pencapaian Tujuan**

1. Apa tujuan utama Pemerintahan Desa dan juga masyarakat desa dalam melaksanakan kegiatan Alokasi Dana Desa?

Jawaban: sudah tentu untuk mensejahterakan hidup masyarakatnya.

2. Apakah hasil kegiatan pembangunan Alokasi Dana Desa sudah sesuai dengan target yang direncanakan?

Jawaban: sudah dan hasilnya sangat memuaskan.

3. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap hasil kerja pembangunan Alokasi Dana Desa?

Jawaban: mereka sangat antusias dan mereka sangat berharap pembangunan dapat ditingkatkan lagi.

## **C. Transparansi dan Akuntabilitas**

1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa?

Jawaban: pengawasan dilakukan secara terbuka.

2. Bagaimana upaya Pemerintahan Desa agar adanya transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa?

Jawaban: dengan melakukan rapat bersama untuk membahas proses pembangunan dan memberitahukan kemana saja Dana Desa digunakan.

3. Apakah pemerintahan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya pembangunan Alokasi Dana Desa?

Jawaban: iya.

## **2. Pelaksanaan Pembangunan**

### **A. Pembangunan sarana Fisik**

1. Apa saja pembangunan yang dilakukan dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa?

Jawaban: pembangunan jembatan, jalan rabat beton, irigasi, pembangunan rumah kompos, perpustakaan desa.

2. Apakah ada permasalahan dalam proses pembangunan di Desa Panompuan Jae ini?

Jawaban: tidak ada.

3. Apakah masyarakat aktif dalam memberikan ide dalam perencanaan pembangunan?

Jawaban: hanya beberapa orang saja.

### **B. Pemberdayaan Masyarakat**

1. Apa saja jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Desa Panompuan Jae?

Jawaban: ada pelatihan perangkat desa, pelatihan keagamaan, pelatihan pembuatan bibit, pelatihan pembuatan pupuk kompos.

2. Apakah kegiatan pemberdayaan ini memberi pengaruh positif bagi masyarakat?

Jawaban: sudah pasti iya.

3. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kegiatan pemberdayaan ini?

Jawaban: tentu mereka merasa senang.

### **C. Pembinaan Masyarakat**

1. Apa saja jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Panompuan Jae ini?

Jawaban: tidak ada kegiatan, hanya pengadaan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat.

2. Jadi apa tujuan dari pembinaan ini jika tidak ada kegiatan?

Jawaban: untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

3. Apa saja barang-barang yang disediakan untuk masyarakat itu?

Jawaban: banyak, pengadaan buku-buku agama, alat-alat pesta, lapangan bola, rehab masjid, pengadaan genset desa.

## **DAFTAR WAWANCARA**

### **PEMERINTAHAN DESA**

**Nama** : **Ridwan Simamora**

**Jabatan** : **Ketua Badan Permusyawaratan Desa**

**Umur** : **62 Tahun**

**Alamat** : **Desa Panompuan Jae**

#### **1. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

##### **A. Mekanisme Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

1. Bagaimana mekanisme penerimaan Alokasi Dana Desa dari pusat ke daerah dan apakah sudah sesuai dengan prosedur ?

Jawaban: sudah cukup baik dan terlaksana dengan semestinya.

2. Apakah ada keterlambatan dari waktu yang telah ditentukan masuknya Alokasi Dana Desa ke Desa Panompuan Jae?

Jawaban: sejauh ini belum ada terjadi keterlambatan.

3. Apakah dalam proses pelaksanaan kegiatan pembangunan Alokasi Dana Desa banyak menemukan kendala-kendala?

Jawaban: kurangnya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintahan Desa.

##### **B. Pencapaian Tujuan**

1. Apa tujuan utama Pemerintahan Desa dan juga masyarakat desa dalam melaksanakan kegiatan Alokasi Dana Desa?



Jawaban: tentu untuk meningkatkan perekonomian masyarakatnya.

2. Apakah hasil kegiatan pembangunan Alokasi Dana Desa sudah sesuai dengan target yang direncanakan?

Jawaban: hasilnya sudah cukup memuaskan.

3. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap hasil kerja pembangunan Alokasi Dana Desa?

Jawaban: masyarakat sangat gembira melihat hasil dari pembangunan ini.

### **C. Transparansi dan Akuntabilitas**

1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa?

Jawaban: pengawasannya dilakukan bersama oleh Kepala Desa, BPD, LKMD dan juga masyarakat.

2. Bagaimana upaya Pemerintahan Desa agar adanya transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa?

Jawaban: pastinya dalam pelaksanaan pengelolaannya dengan melibatkan semua lembaga yang bersangkutan.

3. Apakah pemerintahan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya pembangunan Alokasi Dana Desa?

Jawaban: iya jelas masyarakat harus ikut mengawasinya.

## **2. Pelaksanaan Pembangunan**

### **A. Pembangunan sarana Fisik**

1. Apa saja pembangunan yang dilakukan dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa?

Jawaban: banyak, contohnya jembatan, jalan rabat beton, irigasi.

2. Apakah ada permasalahan dalam proses pembangunan di Desa Panompuan Jae ini?

Jawaban: permasalahannya tidak terlalu banyak dan tidak mengganggu proses pembangunan.

3. Apakah masyarakat aktif dalam memberikan ide dalam perencanaan pembangunan?

Jawaban: ada beberapa orang.

### **B. Pemberdayaan Masyarakat**

1. Apa saja jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Desa Panompuan Jae?

Jawaban: banyak, ada pelatihan perangkat desa, pelatihan keagamaan, pelatihan pembuatan bibit, pelatihan pembuatan pupuk kompos.

2. Apakah kegiatan pemberdayaan ini memberi pengaruh positif bagi masyarakat?

Jawaban: tentu ini memberi pengaruh positif.

3. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kegiatan pemberdayaan ini?

Jawaban: mereka sangat senang.

### **C. Pembinaan Masyarakat**

1. Apa saja jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Panompuan Jae ini?

Jawaban: pembinaan nya bukan berupa kegiatan tetapi pengadaan barang-barang.

2. Jadi apa tujuan dari pembinaan ini jika tidak ada kegiatan?

Jawaban: untuk melengkapi kebutuhan masyarakat.

3. Apa saja barang-barang yang disediakan untuk masyarakat itu?

Jawaban: pengadaan buku-buku agama, alat-alat pesta, lapangan bola, rehab masjid, pengadaan genset desa.

## **DAFTAR WAWANCARA**

### **PEMERINTAHAN DESA**

**Nama : Ali Gebri**

**Jabatan : Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa**

**Umur : 45 Tahun**

**Alamat : Desa Panompuan Jae**

#### **1. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

##### **A. Mekanisme Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

1. Bagaimana mekanisme penerimaan Alokasi Dana Desa dari pusat ke daerah dan apakah sudah sesuai dengan prosedur ?

Jawaban: sejauh ini berjalan dengan baik dan sesuai prosedur.

2. Apakah ada keterlambatan dari waktu yang telah ditentukan masuknya Alokasi Dana Desa ke Desa Panompuan Jae?

Jawaban: tidak ada keterlambatan.

3. Apakah dalam proses pelaksanaan kegiatan pembangunan Alokasi Dana Desa banyak menemukan kendala-kendala?

Jawaban: kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

##### **B. Pencapaian Tujuan**

1. Apa tujuan utama Pemerintahan Desa dan juga masyarakat desa dalam melaksanakan kegiatan Alokasi Dana Desa?

Jawaban: untuk meningkatkan perekonomian masyarakat agar hidupnya sejahtera.

2. Apakah hasil kegiatan pembangunan Alokasi Dana Desa sudah sesuai dengan target yang direncanakan?

Jawaban: cukup memuaskan.

3. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap hasil kerja pembangunan Alokasi Dana Desa?

Jawaban: masyarakat merasa sangat senang karena dengan adanya pembangunan ini sangat berarti untuk mereka.

### **C. Transparansi dan Akuntabilitas**

1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa?

Jawaban: pengawasan dilakukan secara bersama-sama.

2. Bagaimana upaya Pemerintahan Desa agar adanya transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa?

Jawaban: selalu diadakan rapat untuk melaporkan setiap kegiatan yang dilaksanakan.

3. Apakah pemerintahan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya pembangunan Alokasi Dana Desa?

Jawaban: tentu Pemerintahan Desa memberikannya.

## **2. Pelaksanaan Pembangunan**

### **A. Pembangunan sarana Fisik**

1. Apa saja pembangunan yang dilakukan dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa?

Jawaban: ada pembangunan jembatan, jalan rabat beton, irigasi, pembangunan rumah kompos, perpustakaan desa.

2. Apakah ada permasalahan dalam proses pembangunan di Desa Panompuan Jae ini?

Jawaban: tidak ada.

3. Apakah masyarakat aktif dalam memberikan ide dalam perencanaan pembangunan?

Jawaban: hanya beberapa orang saja.

### **B. Pemberdayaan Masyarakat**

1. Apa saja jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Desa Panompuan Jae?

Jawaban: ada pelatihan perangkat desa, pelatihan keagamaan, pelatihan pembuatan bibit, pelatihan pembuatan pupuk kompos.

2. Apakah kegiatan pemberdayaan ini memberi pengaruh positif bagi masyarakat?

Jawaban: sudah pasti iya.

3. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kegiatan pemberdayaan ini?

Jawaban: tentu mereka merasa senang.

### **C. Pembinaan Masyarakat**

1. Apa saja jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Panompuan Jae ini?

Jawaban: tidak ada kegiatan, hanya pengadaan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat.

2. Jadi apa tujuan dari pembinaan ini jika tidak ada kegiatan?

Jawaban: untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

3. Apa saja barang-barang yang disediakan untuk masyarakat itu?

Jawaban: banyak, pengadaan buku-buku agama, alat-alat pesta, lapangan bola, rehab masjid, pengadaan genset desa.

## **DAFTAR WAWANCARA**

### **TOKOH MASYARAKAT**

**Nama** : Irsan Hasibuan

**Jabatan** : Tokoh Masyarakat

**Umur** : 52 Tahun

**Alamat** : Desa Panompuan Jae

#### **1. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

##### **A. Mekanisme Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

1. Bagaimana mekanisme penerimaan Alokasi Dana Desa dari pusat ke daerah dan apakah sudah sesuai dengan prosedur ?

Jawaban: saya kurang tahu masalah penyaluran Dana Desa itu seperti apa.

2. Apakah ada keterlambatan dari waktu yang telah ditentukan masuknya Alokasi Dana Desa ke Desa Panompuan Jae?

Jawaban: saya tidak tahu.

3. Apakah dalam proses pelaksanaan kegiatan pembangunan Alokasi Dana Desa banyak menemukan kendala-kendala?

Jawaban: yang saya tahu kendalanya itu biasanya karena cuaca buruk yang dapat memperlambat pembangunan.



## **B. Pencapaian Tujuan**

1. Apa tujuan utama Pemerintahan Desa dan juga masyarakat desa dalam melaksanakan kegiatan Alokasi Dana Desa?

Jawaban: untuk memperbaiki perekonomian masyarakat agar lebih baik lagi supaya hidupnya lebih sejahtera.

2. Apakah hasil kegiatan pembangunan Alokasi Dana Desa sudah sesuai dengan target yang direncanakan?

Jawaban: sudah, walaupun masih ada yang belum selesai.

3. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap hasil kerja pembangunan Alokasi Dana Desa?

Jawaban: kami sebagai masyarakat tentu sangat senang dan kebutuhan kami dapat dipenuhi.

## **C. Transparansi dan Akuntabilitas**

1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa?

Jawaban: Pemerintahan Desa selalu memberi informasi kepada masyarakat tentang kegiatan yang akan dilakukan dan apa saja rencana-rencana berikutnya.

2. Bagaimana upaya Pemerintahan Desa agar adanya transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa?

Jawaban: Pemerintahan Desa selalu bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait dan juga masyarakat desa.

3. Apakah pemerintahan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya pembangunan Alokasi Dana Desa?

Jawaban: iya tentu.

## **2. Pelaksanaan Pembangunan**

### **A. Pembangunan sarana Fisik**

1. Apa saja pembangunan yang dilakukan dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa?

Jawaban: banyak sekali, ada pembangunan jembatan, jalan rabat beton, irigasi, pembangunan rumah kompos, perpustakaan desa.

2. Apakah ada permasalahan dalam proses pembangunan di Desa Panompuan Jae ini?

Jawaban: tidak ada.

3. Apakah masyarakat aktif dalam memberikan ide dalam perencanaan pembangunan?

Jawaban: hanya beberapa orang saja.

### **B. Pemberdayaan Masyarakat**

1. Apa saja jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Desa Panompuan Jae?

Jawaban: ada pelatihan perangkat desa, pelatihan keagamaan, pelatihan pembuatan bibit, pelatihan pembuatan pupuk kompos.

2. Apakah kegiatan pemberdayaan ini memberi pengaruh positif bagi masyarakat?

Jawaban: sudah pasti iya.

3. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kegiatan pemberdayaan ini?

Jawaban: kami sangat senang dengan adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat ini karena dapat menambah ilmu dan juga dapat membantu kami dalam mengolah persawahan dan perkebunan yang kami miliki.

### **C. Pembinaan Masyarakat**

1. Apa saja jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Panompuan Jae ini?

Jawaban: tidak ada kegiatan, hanya pengadaan barang-barang yang dibutuhkan dan digunakan secara bersama masyarakat.

2. Jadi apa tujuan dari pembinaan ini jika tidak ada kegiatan?

Jawaban: untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

3. Apa saja barang-barang yang disediakan untuk masyarakat itu?

Jawaban: banyak, pengadaan buku-buku agama, alat-alat pesta, lapangan bola, rehab masjid, pengadaan genset desa.



*Chagghul, Cerdas & Terpercaya*  
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

PERMOHONAN PERSETUJUAN  
JUDUL SKRIPSI

Sk-1

Kepada Yth.  
Bapak Ketua Jurusan .....  
FISIP UMSU  
di  
Medan.

Medan, 10 November 2016.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Rizki Ananda Siagian  
N P M : 1303100032  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Tabungan sks : 128 sks, IP Kumulatif : 2.50.

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Efektivitas Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam meningkatkan Pembangunan Di Desa Panompuan Kecamatan Angkola Timur	2
2	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Di Desa Panompuan kecamatan Angkola Timur	
3	Membangun Desa Melalui Program Pembangunan Infra struktur Perdesaan (PIP) Di Desa Panompuan Kecamatan Angkola Timur	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang disahkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti lunas uang SPP tahap berjalan;\*)

Demikianlah permohonan saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak, saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Jurusan :  
Diteruskan kepada Dekan untuk  
Penetapan judul dan pembimbing.

917

Pemohon,

Medan, tgl. 12-11-2016

*Rizki*

(Rizki Ananda Siagian)

Ketua,

*[Signature]*

(.....)

Pemb. I. Tasmit Syam  
Pemb. II. Anfin Saleh

\*) dilampirkan setelah judul ditandasetujui oleh Ketua Jurusan.



*Unggul, Cerdas & Terpercaya*

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI  
DAN PEMBIMBING**  
Nomor : 417 /SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2017

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 1 Tahun 2003 dan Rekomendasi Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara tertanggal, 12 November 2016 dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **RIZKI ANANDA SIAGIAN**  
N P M : 1303100032  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Semester : VII ( Tujuh ) Tahun Akademik 2016/2017  
Judul Skripsi : **EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DESA PANOMPIAN JAE KECAMATAN ANGKOLA TIMUR KABUPATEN TAPANULI SELATAN.**

Pembimbing I : Drs.Tasrif Syam., M.Si.  
Pembimbing II : Dr. Arifin Saleh., M.SP.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 13 Muharram 1437 H / 26 Oktober 2015 M.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

**Masa kadaluarsa tanggal, 12 Desember 2017.**

Ditetapkan di Medan,  
Pada tanggal : 11 Jumadil Awal 1438 H  
08 Pebruari 2017 M



Tembusan :

1. Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing I dan II ybs. Di Medan;
3. Pertiinggal.



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar menyebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website : http://www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Sk-3

PERMOHONAN  
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.  
Bapak Dekan FISIP UMSU  
di  
Medan.

Medan, 30 Desember 2016.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Rizki Ananda Siagian  
N P M : 1303100032  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

mengajukan permohonan mengikuti seminar proposal skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 417./SK/II.3-AU/UMSU-03/F/20.16.. tanggal 30 Desember 2016 dengan judul sebagai berikut :

Efektivitas Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan  
Pembangunan di Desa Panompuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten  
Tapanuli Selatan


Bersama permohonan ini turut saya lampirkan foto copy :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK-1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda bukti lunas biaya seminar proposal skripsi;
7. Proposal skripsi yang telah disahkan oleh kedua pembimbing (rangkap 5).


Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Menyetujui :

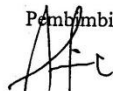
Pembimbing I

  
(Drs. Tasrif Saleh, M.Si)

Pemohon,

  
(Rizki Ananda Siagian)

Pembimbing II

  
(Arifin Saleh, S.Sos., M.Sp)

**UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nomor : 281 /KEP/II.3-AU/UMSU-031F/2016

Program studi : Ilmu Administrasi Negara  
 Hari, Tanggal : Jum'at, 6 Januari 2017  
 Waktu : 14.00 s/d. selesai  
 Tempat : LAB. FISIP UMSU  
 Pemimpin Seminar : Nalli Khairiah, S.IP, M.Pd

No.	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggung	Pembimbing I & II	Judul Proposal Skripsi
1	WAHYUDI	1303100004	1 DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si	1 NALLI KHAIRIAH, S.IP, M.Pd 2 LEYLA KHAIRANI, Dr, M.Si	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA TANJUNG MEDAN KECAMATAN TANJUNG MEDAN KABUPATEN ROKAN HILIR
2	SRI PADLI ANJUM PASARIBU	1303100030	1 BANGUN NAPITUPULU, Drs, M. Si	1 A. HIDAYAH DLT, Drs, H, M.Si 2 SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	PENGARUH DISIPLIN PEGAWAI TERHADAP PENINGKATAN KINERJA PEMBUATAN AKTIF KELAHIRAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN ROKAN HILIR
3	AFIFAH MATONDANG	1303100031	1 TASRIF SYAM, Drs, M.Si	1 DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si 2 ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.	EFEKTIVITAS PROGRAM SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIK) DALAM RANGKA MENINGKATKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA MEDAN
4	RIZKI ANANDA SIAGIAN	1303100032	1 R. KUSNADI, Drs, M.AP	1 TASRIF SYAM, Drs, M.Si 2 ARIFIN SALEH, Dr, M.SP	EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DESA PANOMPUN KECAMATAN ANGKOLA TIMUR KABUPATEN TAPANULI SELATAN
5	YENI RISKAWATI	1303100033	1 IDA MARTINELLY, SH, MM	1 DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si 2 NALLI KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OANUN NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DASERAH (PAD) DI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KERAYAAN KABUPATEN BENER MERIAH

Medan, 05 R. Akhir, 1438 H  
 05 Januari 2017 M



Nalli Khairiah, M.Si



Unggul Kualitas Pendidikan  
Bija menabih bibit ini agar dihasilkan  
taman-taman terpuji

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mukjizat Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umhu.ac.id> Email : [rektor@umhu.ac.id](mailto:rektor@umhu.ac.id)

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Rizki Ananda Sigian  
NPM : 1303100032  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Pengelolaan Alotasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Perompangan Jae Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
	9/3-2019	1. SEMPURNAKAN ABSTRAK	
		2. ATUR JARAK / SPASI PENULISAN, SEQUAIKAN DEN PROSEDUR PENELITIAN	
	11/3-2019	3. SEQUAIKAN KOPPIAN DEN DAFTAR PUSTAKA	
	17/3-2019	4. KOREKSI JENIS PENULISAN BAB-3	
		5. BENYAIK NAMA SUMBER DI KELOMPOKAN DALAM BAB-4.	
	14/3-2019	6. SEDERHANAKAN PROFILE DESA	
	15/3-2019	7. HASIL WAWANCARA DESKRIPSIKAN DEN BAHASA PENEGAP	
	14/3-2019	8. KIRIL WY TIDAK ADITAKAN KUPPI	
	17/3-2019	9. SEMPURNAKAN ANALIS DATA	
	18/3-2019	10. ARAK PENYIMPUNAN	

Medan, 18 Maret 2019.

Dekan,  
  
(Drs. Basif Satrio, M.Si.)

Ketua Jurusan,  
  
(Nakil Khatimah, S.P., M.Pd.)

Pembimbing ke : ...  
  
(Drs. Basif Satrio, M.Si.)





Unggul, Cerdas & Terpercaya  
Bila membaca surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan, 20238 Telp. (061) 66224567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Rizki Ananda Siagian  
N P M : 0303100032  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Perompuan Jae Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	16/12-2016	1. Bimbingan perbaikan proposal dari bab 1 sampai bab 3.	
2	22/12-2016	2. Bimbingan proposal bab 1, lengkapi data Alokasi Dana Desa mulai tahun 2015-2016.	
3	30/12-2016	3. Bimbingan metode penelitian	
4	3/12-2016	4. Bimbingan daftar wawancara	
5	7/1-2017	5. Bimbingan bab 1-5, perbaiki isi, jarak, penulisan, sesuaikan dengan prosedur.	
6	8/1-2017	6. Lengkapi dengan abstrak dan daftar isi	
7	9/1-2017	7. Periksa kembali bab 3, Lengkapi setiap data dengan sumber	
8	10/1-2017	8. Bimbingan isi dan penulisan abstrak	
9	14/3-17	9. Bimbingan cara penulisan skripsi mulai dari penulisan sampai ukuran dan spasi.	
10	16/3-17	10. Perbaiki Bab 1 dan 2	

Medan, 16 Maret 2017

Dekan,

(Drs. Desri Sam, M.Si)

Ketua Jurusan,

(Nalla Khairiah, S.Pd, M.Pd)

Pembimbing ke : 2.

(Dr. Kristin Saleh, M.Si)



*Unggul, Cerdas & Terpercaya*  
ila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : 417 / KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2016  
Lampiran : -  
Hal : **Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa**

Medan, 13 Rabiul Akhir 1438 H  
12 Januari 2017 M

Kepada : Yth, Bapak Kepala Desa  
Panompuan Jae Kecamatan Angkola Timur  
Kabupaten Tapanuli Selatan  
di -  
Tempat

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu ( S1 ), kami mohon kiranya Bapak / Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama mahasiswa : RIZKI ANANDA SIAGIAN  
N P M : 1303100032  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2016 / 2017  
Judul Skripsi : EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DESA PANOMPIUAN KECAMATAN ANGKOLA TIMUR.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dekan

SRIF SYAM, M.Si



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN**  
**KECAMATAN ANGKOLA TIMUR**  
**DESA PANOMPIUAN JAE**

Panompuan Jae, 06 Pebruari 2017

Nomor : 2003/022/KD/2017  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Penelitian Mahasiswa  
An. RIZKI ANANDA SIAGIAN

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di -  
Medan

Sehubungan dengan Surat Dekan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tertanggal 12 Januari 2017 hal. Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa an. Rizki Ananda Siagian.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas telah sampai kepada kami Pemerintahan Desa Panompuan Jae dan telah kami berikan keterangan dan informai data yang dibutuhkan oleh yang bersangkutan untuk kelengkapan penulisan Skripsi dalam rangka penyelesaian program studi Jenjang Strata Satu (S1) di Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Sik-10



**UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI**

Nomor : 86 /UND/II.3-AU/UMSU-03/IF/2017

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Hari, Tanggal : Sabtu, 01 April 2017

Waktu : 08,00 s.d. selesai

Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	Penguji		Judul Skripsi
			Utama	Pendamping/Pembimbing	
6	RIZKI ANANDA SIAGIAN	1303100032	1 BANGUN NAPITUPULU, Drs, M.Si 2 RAFDINAL, S.Sos, M.AP	1 TASRIF SYAM, Drs, M.Si 2 ARIFIN SALEH, Dr., M.SP.	EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DESA PANOMPUN JAE KECAMATAN ANGKOLA TIMUR KABUPATEN TAPANULI SELATAN
7	VANI APRILLIA	1303100038	1 TASRIF SYAM, Drs, M.Si 2 AFFAN ALQUDDUS, S.Sos	1 R. KUSNADI, Drs, M.AP 2 NALLI KHAIIRAH, S.IP, M.Pd	AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM PELAKSANAAN PENGURUSAN E-KTP DI KELURAHAN GLUGUR DARAT I KECAMATAN MEDAN TIMUR
8	ANNISA KHAIRI SABILA	1303100039	1 NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd 2 RAFDINAL, S.Sos, M.AP	1 IDA MARTINELLY, SH, MM 2 ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2014 TENTANG PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS KEJURUAN MUDA ACEH TAMIANG
9	JUSMA	1303100044	1 IDA MARTINELLY, SH, MM 2 RAFDINAL, S.Sos, M.AP	1 TASRIF SYAM, Drs, M.Si 2 SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PEMBUATAN KARTU KELUARGA DI KECAMATAN LINGGA BAYU KABUPATEN MANDAILING NATAL
10	NURMALLIA	1303100049	1 IDA MARTINELLY, SH, MM 2 ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	1 A. HIDAYAH DLT, Drs, H, M.Si 2 ARIFIN SALEH, Dr., M.SP.	PENGARUH PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DI RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN BATU BARA

Notulis Sidang :

1.



Ditandatangani oleh :  
An. Rektor  
Maktil Rektor I  
DR. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

Ketia,  
Drs. TASRIE SYAM, M.Si



Panitia Ujian

Medan, 02 Rajab 1438 H  
30 Maret 2017 M

Sekretaris  
Drs. ZULFAHM, M.I.Kom



*Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya.*

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
PERPUSTAKAAN**

Alamat : Jalan Kapten Mukhtar Basri No.3 Telp. 6624567 –Ext. 113 Medan 20238

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: **1211/KET/II.3/UMSU-P/F/2017**

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **Rizki Ananda Siagian**  
N P M : 1303100032  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

adalah benar telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 15 Jumadil Akhir 1438.H  
14 Maret 2017.M.

Kepala UPT Perpustakaan  
  
H. Irfan Bustami, S.H., M.Hum